

**PENGARUH KINERJA LINGKUNGAN, PERTUMBUHAN
PERUSAHAAN, DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP
NILAI PERUSAHAAN**

***THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE,
CORPORATE GROWTH, AND CAPITAL STRUCTURE ON
FIRM VALUE***

**FEBRIANI TRIASTUTI
8335072915**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2012**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Dian Citra Aruna, SE, M.Si.</u> NIP. 19760908 1999 03 2 001	Ketua		6/2/2012
2. <u>Diena Noviarini, M.Si.</u> NIP. 19751115 2008 12 2 002	Sekretaris		2/2/2012
3. <u>Diena Noviarini, M.Si.</u> NIP. 19751115 2008 12 2 002	Penguji Ahli I		2/2/2012
4. <u>Indra Pahala, M.Si.</u> NIP. 19790208 2008 12 1001	Penguji Ahli II		1/2/2012
5. <u>Ratna Anggraini ZR, SE, Akt, M.Si.</u> NIP. 19740417 2000 12 2 001	Pembimbing I		2/2/2012
6. <u>M. Yasser Arafat, SE, MM.</u> NIP. 19710413 2001 12 1 001	Pembimbing II		1/2/2012

Tanggal Lulus 31 Januari 2012

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Sripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 1 Februari 2012



Febriani Triastuti
8335072915

ABSTRAK

Febriani Triastuti, 2012; Pengaruh Kinerja Lingkungan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Struktur Modal terhadap Nilai perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris mengenai pengaruh kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam BEI dan terdaftar dalam pengumuman PROPER Kementerian Lingkungan Hidup periode 2007-2009. Total sampel penelitian ini adalah 14 perusahaan.

Metode statistik yang digunakan, yaitu uji t, uji F, dan regresi linear berganda. SPSS 17 *for Windows* digunakan untuk mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan tapi tidak signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susliyanti (2007). Pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan tapi tidak signifikan. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Kim (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Struktur modal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Chandra, 2007) tapi tidak konsisten dengan penelitian Mas'ud (2008) yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Semua variabel independen, yaitu kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci: kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, struktur modal, nilai perusahaan.

ABSTRACT

Febriani Triastuti, 2012; The Influence of Environmental Performance, Corporate Growth, and Capital Structure on Firm Value.

The objective of this study is to empirically examine the influence of environmental performance, corporate growth, and capital structure on firm value. The research samples were corporate which are listed on Indonesian Stock Exchange and listed in announcement of PROPER Ministry of Environment period 2007-2009. Total samples in this research are 14 corporates.

Statistical methods used were t test, F test, and double linear regression. SPSS 17 for Windows is used for data processing. The results showed that environmental performance had positive affect on firm value but not significance. This results of this study are consistent with previous research primarily conducted by Susliyanti (2007). Corporate growth had positive affect on firm value but not significance. This result is inconsistent with Kim study (2009) which said corporate growth had significantly positive affect on firm value. Capital structure had significantly negative affect on firm value. This result is consistent with the previous study (Chandra, 2007) but inconsistent with Mas'ud study (2008) wich said capital structure had significantly positive affect on firm value. All of the independent variables which are environmental performance, corporate growth, and capital structur had simultaneous affect on firm value.

Keywords: environmental performance, corporate growth, capital structure, firm value.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan YME, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul Pengaruh Kinerja Lingkungan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua tersayang dan kedua saudariku atas dukungannya, baik moril maupun materil selama penulis mengerjakan skripsi ini.
2. Ibu Ratna Anggraini dan Bapak M. Yasser Arafat selaku dosen pembimbing I dan II, atas segala arahan dan bimbingan yang diberikan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
3. Bapak M. Yasser Arafat selaku ketua jurusan akuntansi dan ibu Dian Citra Aruna selaku ketua program S1 akuntansi.
4. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi UNJ atas segala bantuan yang mempermudah penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa akuntansi 2007, yang senantiasa memberi semangat satu sama lain.
6. Pihak-pihak lain yang turut membantu kelancaran penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang memerlukan berbagai penyempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jakarta, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	6
2.1 Kajian Pustaka.....	6
2.1.1 Tanggung Jawab Sosial.....	6
2.1.2 Kinerja Lingkungan.....	7
2.1.3 PROPER KLH.....	8

	2.1.4	Pertumbuhan Perusahaan.....	11
	2.1.5	Struktur Modal.....	13
	2.1.6	Nilai Perusahaan.....	15
	2.2	Review Penelitian Terdahulu.....	18
	2.3	Kerangka Pemikiran.....	23
	2.4	Hipotesis.....	24
BAB III		OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN.....	26
	3.1	Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	26
	3.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	26
	3.3	Metode Pengumpulan Data.....	27
	3.4	Teknik Penentuan Populasi dan Sampel.....	30
	3.5	Metode Analisis.....	31
BAB IV		HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
	4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	39
	4.2	Uji Statistik Deskriptif.....	40
	4.3	Uji Asumsi Klasik.....	42
	4.4	Analisis Regresi Berganda.....	45
	4.5	Koefisien Determinasi.....	50
	4.6	Uji Hipotesis.....	51
	4.7	Pembahasan.....	54
BAB V		KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
	5.1	Kesimpulan.....	58
	5.2	Keterbatasan Penelitian.....	59

5.3	Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	62
	LAMPIRAN.....	64
	RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Kriteria Peringkat PROPER.....	10
3.1	Nilai Peringkat PROPER.....	27
3.2	Kriteria Uji Durbin-Watson.....	33
4.1	Penentuan Sampel Perusahaan.....	39
4.2	Statistik Deskriptif.....	40
4.3	Uji Multikolinearitas.....	43
4.4	Uji Autokorelasi.....	44
4.5	Uji Glejser.....	45
4.6	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	48
4.7	Koefisien Determinasi.....	50
4.8	Uji ANOVA (Uji F).....	51
4.9	Uji t (<i>t-test</i>).....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
4.1	Grafik Normal P-P Plot.....	42
4.2	Grafik <i>Scatterplot</i>	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Hasil SPSS.....	64
2	Daftar Sampel Perusahaan.....	67
3	Data-data Perusahaan.....	68
4.	Indikator Penilaian PROPER.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau yang juga dikenal dengan sebutan *CSR (Corporate Social Responsibility)* marak diperbincangkan beberapa dekade belakangan ini. Hal ini diawali dengan diselenggarakannya KTT Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro, Brazilia, tahun 1992 hingga diluncurkannya ISO 26000 pada 1 November 2010 sebagai standar pedoman tanggung jawab sosial

Awalnya tidak banyak perusahaan yang menganggap tanggung jawab sosial sebagai hal penting yang perlu dilakukan. Namun seiring perkembangan zaman, muncul banyak masalah-masalah lingkungan yang ditimbulkan oleh industri-industri akibat ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar industri mereka. Oleh karena itu, timbul argumen-argumen yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut. Menurut Sony Keraf (2006), terdapat beberapa argumen yang mendukung perlunya keterlibatan sosial perusahaan, seperti kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah, terbatasnya sumber daya alam, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan, serta keuntungan jangka panjang bagi perusahaan.

Melaksanakan perilaku sosial yang bertanggung jawab bukan lagi sebuah pilihan, tapi telah menjadi sebuah persyaratan dari masyarakat di seluruh dunia. Penerapan *CSR* tidak lagi dianggap sebagai *cost*, melainkan investasi perusahaan (Erni, 2007). Pada awalnya, mungkin saja pembiayaan untuk pengelolaan lingkungan akan merugikan secara finansial dalam jangka pendek. Akan tetapi, seiring dengan terciptanya citra yang positif, hal ini justru akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan tidak dapat lagi mengabaikan tanggung jawab sosial. Saat ini masyarakat semakin cerdas dan selektif dalam memilih suatu produk. Pertimbangan dalam memilih produk salah satunya adalah citra perusahaan yang dapat diwujudkan melalui tanggung jawab sosial mereka.

Pelaksanaan kinerja lingkungan di Indonesia oleh perusahaan-perusahaan didorong oleh adanya aturan-aturan pemerintahan setempat, salah satunya UU RI No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Mengacu pada undang-undang tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membuat penilaian terhadap perusahaan-perusahaan mengenai kinerja lingkungan mereka, yang kemudian hasilnya dipublikasikan secara periodik dalam situs resmi mereka yang dapat diakses oleh siapa saja yang merasa membutuhkan dan berkepentingan. Program yang dilakukan KLH ini lebih dikenal dengan sebutan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja). Publikasi PROPER inilah yang

dijadikan sebagai indikator pengukuran kinerja lingkungan dalam penelitian ini.

Kehilangan konsumen merupakan suatu masalah besar bagi perusahaan. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan para *shareholder* dan keberlangsungan perusahaan. Jika perusahaan mampu mempertahankan serta menarik lebih banyak konsumen, maka penjualannya pun akan meningkat. Penjualan yang terus meningkat dari satu periode ke periode selanjutnya dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Sesuai dengan pendapat Dess (2008) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ditandai dengan adanya peningkatan penjualan yang kuat. Dengan pertumbuhan perusahaan yang meningkat, kesejahteraan para *shareholder* pun semakin terjamin, yang berarti nilai perusahaan juga meningkat.

Penelitian Amanah (2006) menyatakan bahwa nilai perusahaan meningkat setelah meningkatkan *leverage* dan mulai menurun ketika *leverage* telah mencapai tingkat yang sangat ekstrim. Hal ini menunjukkan bahwa struktur modal yang diekspresikan melalui komposisi hutang dan modal mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Sriwardany (2007), menunjukkan bahwa pertumbuhan dan struktur modal berpengaruh terhadap harga saham. Dengan demikian, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal juga berpengaruh terhadap nilai.

Dari penjelasan di atas, sekilas terlihat bahwa *Corporate Social Responsibility* khususnya kinerja lingkungan dalam penelitian ini, mampu memberikan manfaat-manfaat terhadap perusahaan, di antaranya terhadap nilai perusahaan serta kesan di mata masyarakat, sehingga mereka mau menggunakan produk suatu perusahaan. Di samping itu, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal juga turut mendukung nilai perusahaan. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat tema Pengaruh Kinerja Lingkungan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kinerja lingkungan mempengaruhi nilai perusahaan?
2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris mengenai pengaruh kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa bahan masukan serta pengembangan ilmu dalam dunia pendidikan, khususnya pada akuntansi keuangan.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pelaku bisnis mengenai pentingnya penerapan *CSR* khususnya mengenai kinerja lingkungan dalam bisnis mereka demi meningkatkan nilai perusahaan.
3. Penulis dapat menerapkan ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan pada masalah yang sebenarnya serta mampu mengetahui hubungan dan perbedaan antara teori dan praktek.
4. Dapat dijadikan referensi bagi penulis lain untuk dijadikan sebagai bahan pendukung dalam penelitian lainnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tanggung Jawab Sosial

Vasin, Heyn & Company (2001) mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai penekanan komitmen suatu organisasi untuk bertindak secara ekonomis dan menjaga lingkungan serta menghormati kepentingan para pemegang kepentingan di perusahaan. Sementara itu, A.B. Susanto (2009) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun ke luar perusahaan. Di sisi lain, *The World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk senantiasa berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat luas pada umumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan sebuah tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan.

Pandangan CSR yang komprehensif, dilontarkan oleh *Prince of Wales International Business Forum* – yang dipromosikan oleh IBL – melalui lima pilar, yaitu:

1. *Building human capital*, menyangkut kemampuan perusahaan untuk memiliki dukungan sumber daya manusia yang ada (internal), dan masyarakat sekitar (eksternal).
2. *Strengthening economics*, memberdayakan ekonomi komunitas.
3. *Assessing social cohesion*, maksudnya perusahaan menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan konflik.
4. *Encouraging good governance*, artinya dijalankan dalam tata kelola yang baik.
5. *Protecting the environment*, perusahaan harus menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.2 Kinerja Lingkungan

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai segala sesuatu di sekitar suatu objek yang saling mempengaruhi (Suratmo, 2004). Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia

dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta lingkungan hidup. Sementara itu, UU RI No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, mendefinisikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dengan demikian kinerja lingkungan dapat diartikan sebagai upaya perusahaan melestarikan lingkungan terutama lingkungan yang terkena dampak aktivitas perusahaan tersebut.

Di Indonesia, terdapat lembaga tersendiri yang menilai kinerja lingkungan suatu perusahaan, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sejak tahun 1995, secara berkala KLH menerbitkan peringkat kinerja lingkungan perusahaan yang lebih dikenal dengan sebutan PROPER KLH.

2.1.3 PROPER KLH

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) adalah salah satu instrumen kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan dan kepedulian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mekanisme kerja

instrumen PROPER adalah dengan penyebaran informasi tingkat kinerja penataan perusahaan kepada masyarakat dan *stakeholder* (*public information disclosure*), maka diharapkan masyarakat dan *stakeholder* dapat menyikapi kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan peserta PROPER sesuai dengan kapasitasnya.

Keberhasilan PROPER sebagai instrumen penataan dapat dilihat dari indikator berikut:

1. Meningkatnya tingkat penataan perusahaan.
2. Menurunnya beban pencemaran yang masuk ke lingkungan
3. Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan
4. Meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap hasil penilaian

Pelaksanaan PROPER merupakan upaya terpadu untuk melaksanakan kebijakan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jumlah perusahaan yang telah dinilai peringkatnya melalui PROPER selama periode 2007 – 2009 mencapai 516 perusahaan dari 521 perusahaan yang dilakukan pengawasan oleh Tim PROPER Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dari jumlah tersebut, yang termasuk baik berjumlah 235 (Kriteria Emas, Hijau, dan Biru).

Tabel 2.1 Kriteria Peringkat PROPER

Peringkat	Kriteria
Emas	Telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi dan/atau jasa, melakukan upaya 3R (<i>Reuse, Recycle, dan Recovery</i>), serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Hijau	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 3R (<i>Reuse, Recycle dan Recovery</i>), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (<i>CSR/Comdev</i>) dengan baik.
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan, namun belum melakukan upaya 3R (<i>Reuse, Recycle dan Recovery</i>).
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hitam	Sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (2009)

1. Bagi pemerintah, manfaat lain pelaksanaan PROPER adalah: PROPER dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan makro yang telah dilakukan di tingkat pusat maupun daerah

2. Sedangkan perusahaan pelaksanaan PROPER juga mendapatkan berbagai manfaat, seperti: perusahaan dapat menggunakan informasi peringkat PROPER sebagai *benchmark* untuk mengukur kinerja perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan yang berperingkat Hijau atau Emas, PROPER dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan perusahaan.
3. Para investor, konsultan, supplier, dan masyarakat, dapat menjadikan PROPER sebagai balai kliring untuk mengetahui kinerja penaatan perusahaan. PROPER dapat digunakan oleh investor untuk mengukur tingkat risiko investasi mereka.

2.1.4 Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan ditandai dengan adanya peningkatan penjualan yang kuat (Dess, 2008). Suatu Perusahaan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhannya dengan meningkatkan barang dan jasa di negaranya dan menjualnya secara internasional (Hill, 2008). Potensi pertumbuhan dapat diukur dari besarnya biaya penelitian dan pengembangan. Semakin besar *R&D cost*-nya berarti ada prospek perusahaan yang tumbuh (Sartono, 2001:248). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan menunjukkan suatu perusahaan sedang

berkembang. Perkembangan ini dapat berupa ekspansi, baik adanya produk baru maupun menjangkau lokasi baru.

Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan karena pertumbuhan yang baik memberikan tanda bagi perkembangan perusahaan (Safrida, 2008). Dari sisi investor, pertumbuhan perusahaan yang baik dianggap menguntungkan dan diharapkan memiliki tingkat pengembalian investasi yang baik.

Pertumbuhan perusahaan dihitung menggunakan penjualan perusahaan tahun yang bersangkutan dikurangi penjualan tahun sebelumnya dan dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Almilia (2003). Sementara itu, menurut Asih (2006), pertumbuhan perusahaan yang diberi simbol *GROW* diukur dengan menggunakan hasil bagi antara selisih total aktiva tahun ke-t dan total aktiva tahun ke-t-1 dengan total aktiva tahun ke-t-1.

$$GROW = \frac{TA_t - TA_{t-1}}{TA_{t-1}}$$

Keterangan:

GROW = Pertumbuhan perusahaan

TA_t = Total aktiva tahun ke-t

TA_{t-1} = Total aktiva tahun ke-(t-1)

2.1.5 Struktur Modal

Firm's capital structure (struktur modal perusahaan) menurut Stephen A. Ross (2010) adalah kombinasi spesifik dari hutang jangka panjang dan modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Sedangkan menurut James C. Van Horne (2007), struktur modal merupakan bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka panjang perusahaan yang diwakili oleh utang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Kebijakan struktur modal ialah kebijakan perusahaan dalam pemilihan sumber dana, baik internal maupun eksternal perusahaan (Sriwardany, 2007). Sumber dana internal berasal dari laba ditahan atau pun setoran modal. Sementara itu, sumber eksternal berasal dari hutang dan penerbitan saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur modal adalah proporsi penggunaan modal sendiri dan hutang yang ditetapkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.

Ada beberapa teori mengenai struktur modal, di antaranya:

1. Pendekatan Laba Operasional Bersih (NOI)

Pendekatan ini merupakan teori struktur modal dengan biaya modal rata-rata tertimbang dan nilai total perusahaan tetap konstan ketika *leverage* keuangan berubah.

2. Pendekatan Tradisional

Pendekatan ini merupakan teori struktur modal yang terdapat struktur modal optimal dan yang memungkinkan pihak manajemen menaikkan penilaian total perusahaan melalui penggunaan *leverage* keuangan secara hati-hati. Struktur modal optimal adalah struktur modal yang meminimalkan biaya modal perusahaan dan karenanya memaksimalkan nilai perusahaan.

3. Teori *Pecking-Order*

Kunci utama dari teori *pecking-order* adalah perusahaan lebih memilih untuk menggunakan pendanaan internal kapan pun jika memungkinkan. Jika suatu perusahaan sangat berpotensi menghasilkan profit, perusahaan ini mungkin saja tidak membutuhkan pendanaan eksternal, sehingga pada akhirnya akan berakhir dengan sedikit atau tidak ada hutang sama sekali. Teori *pecking-order* memiliki beberapa implikasi, diantaranya tidak adanya target struktur modal atau tidak ada nilai optimal *debt-equity ratio*. Selain itu, perusahaan dengan yang menghasilkan profit tinggi menggunakan lebih sedikit hutang.

Menurut Purnomo Yusgiantoro (2004), struktur modal merupakan komposisi ekuitas (E) dan pinjaman (D) dalam

pembiayaan proyek. Berikut ini adalah pengukuran struktur modal yang telah dipakai sebelumnya di beberapa penelitian (Sriwardhany, 2007):

$$\text{Capital Structure} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

2.1.6 Nilai Perusahaan

Menurut Fama (1978) dalam Untung wahyudi et.al , nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai asset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga akan meningkatkan harga saham Dengan meningkatnya harga saham maka nilai perusahaan pun akan meningkat.

Indikator- indikator yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya adalah:

1. PER (*Price Earning Ratio*)

PER yaitu rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan

keuntungan yang diperoleh para pemegang saham. (Sutrisno, 2000 dalam Mohammad Usman, 2001 dalam Malla Bahagia, 2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi PER adalah:

- a. Tingkat pertumbuhan laba
- b. Dividend Payout Ratio
- c. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal.

2. PBV (*Price Book Value*)

Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh (Brigham, 1999: 92).

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan *price to book value*. *Price to book value* yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan kedepan. Hal itu juga yang menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham juga tinggi (Soliha dan Taswan, 2002).

Nilai Perusahaan dapat diekspresikan sebagai klaim atas nilai dari aset perusahaan tersebut. Jadi, nilai perusahaan sama dengan total nilai pasar kewajiban ditambah total nilai pasar ekuitas pemilik perusahaan (Stowe,2007):

$$Firm\ Value = Equity + Debt$$

Pengukuran nilai pasar yang sering dikutip adalah rasio nilai pasar terhadap buku (*market to book ratio*) (Ross,2009):

$$Market\ to\ book\ ratio = \frac{\text{Nilai Pasar per Lembar Saham}}$$

Nilai Buku per Lembar Saham

Pengukuran lainnya ialah rasio Tobin's Q. Nilai perusahaan dapat diukur menggunakan Nilai Tobins' Q. Pengukuran ini menghipotesiskan bahwa nilai pasar yang dikombinasikan dari semua perusahaan pada bursa saham harus sepadan dengan nilai gantinya.

Berikut ini adalah perhitungan Nilai Tobins' Q (Susliyanti, 2007):

$$Q = \frac{(P) (N) + D}{BVA}$$

Keterangan:

Q : nilai perusahaan

P : harga pasar saham (*closing price*)

N : jumlah lembar saham yang beredar

D : nilai buku total hutang

BVA : nilai buku total aktiva

Menurut konsepnya, rasio Q lebih unggul daripada rasio nilai pasar terhadap nilai buku karena rasio ini berfokus pada berapa nilai perusahaan saat ini secara relatif terhadap berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya saat ini (Ross, 2009). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki rasio Q lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki peluang investasi yang menarik.

2.2 Review Penelitian Relevan

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Eni Dwi Susliyanti (2007)

Penelitian yang dilakukan oleh Eni Dwi Susliyanti (2007) bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tanggung jawab sosial dengan kinerja dan nilai perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya: (1) tanggung jawab sosial perusahaan, (2) Profitabilitas (*ROA*, *ROE*, *NPM*), (3) ukuran perusahaan, (4) rasio *price/earning*, (5) resiko, serta (6) nilai perusahaan.

Penelitian dilakukan terhadap 22 perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 1999-2003 serta yang berada pada pengumuman PROPER KLH pada tahun 2003-2004. Kelima hipotesisnya diuji menggunakan uji *t* dan *Spearman's Rank Correlation*. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Tanggung jawab sosial perusahaan berkorelasi secara positif dengan ukuran perusahaan, ROA, ROE, NPM, rasio *price/earnings*, dan nilai perusahaan. Namun hanya NPM yang berpengaruh signifikan, (2) Tanggung jawab sosial berkorelasi negatif dengan resiko, (3) Pada pengujian *Spearman's Rank Correlation*, ada korelasi positif signifikan antara tanggung jawab sosial dengan ROE, NPM, dan rasio *price/earning*. Namun ada korelasi negatif antara CSR dan nilai perusahaan.

2. Ni Wayan Yuniasih dkk (2007)

Penelitian Yuniasih bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan *corporate social responsibility* dan *good corporate governance* sebagai variabel pemoderasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya: (1) nilai perusahaan, (2) *Return on Investment (ROA)*, (3) Pengungkapan *CSR*, (4) *Good Corporate Governance*.

Penelitian dilakukan pada 27 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ yang melakukan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan secara berturut-turut selama periode 2005-2006.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) ROA terbukti berpengaruh positif secara statistik pada nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ selama tahun 2005-2006. (2) Pengungkapan CSR sebagai variabel pemoderasi terbukti berpengaruh positif secara statistik pada hubungan *return on asset* dan nilai perusahaan. (3) Kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi tidak terbukti berpengaruh terhadap hubungan ROA dan nilai perusahaan.

3. Lailatul Amanah (2006)

Lailatul Amanah melakukan penelitian tentang analisis struktur modal dan nilai perusahaan yang diukur dengan *tobins Q*. Hasil dari penelitian ini, yaitu (1) nilai perusahaan meningkat setelah meningkatkan hutang. (2) perbedaan return saham sebelum dan sesudah menambah hutang tidak signifikan.

4. Sriwardany, dkk (2007)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal dan dampaknya terhadap perubahan harga saham pada perusahaan manufaktur Tbk. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya: (1) pertumbuhan perusahaan, (2) harga saham, (3) kebijaksanaan struktur modal.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu (1) Pertumbuhan memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. (2) Pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap

kebijaksanaan struktur modal. (3) Struktur modal mempunyai hubungan yang negatif terhadap harga saham. (4) Pertumbuhan perusahaan mempunyai hubungan langsung terhadap perubahan harga saham.

5. Teddy Chandra (2007)

Penelitian yang dilakukan Teddy Chandra bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal terhadap produktivitas aktiva, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan. Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu (1) struktur modal, (2) produktivitas aktiva, (3) kinerja keuangan, (4) nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian ini, hasil yang didapat diantaranya: (1) Struktur modal berpengaruh positif terhadap produktivitas aktiva, (2) Struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, (3) Struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang konsumsi, sektor *property & real estate*, serta transportasi dan infrastruktur.

6. Masdar Mas'ud (2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Masdar Mas'ud bertujuan untuk menganalisis fakto-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan hubungannya terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penelitian ini, hasil yang didapatkan diantaranya: (1) profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, (2) ukuran perusahaan berpengaruh positif

dan signifikan terhadap penentuan hutang dalam struktur modal, (3) *growth opportunity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penentuan hutang dalam struktur modal, (4) struktur aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal, (5) *cost of financial distress* berpengaruh terhadap struktur modal, (6) *tax shields effects* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal, (7) struktur modal berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan.

7. Kim Hiang Liow (2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Kim bertujuan untuk mengetahui dari ketiga variabel (*Growth, Profitability, Leverage*) yang paling penting dalam menjelaskan dan memprediksi tingkat dari dua pengukuran *stock market success*, yakni *Sharpe ratio* dan *Jensen's alpha*. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil beberapa sampel perusahaan dari 24 negara yang tersebar di Asia, Eropa, dan Amerika Utara.

Kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) *firm value* dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh *market capitalisation*, kecuali negara Swedia, Norwegia dan Perancis yang koefisiennya negatif tidak signifikan, (2) Secara keseluruhan, *growth* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *firm value*, (3) *Profitability* berhubungan signifikan dan negatif dengan *capital structure*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada perusahaan itu sendiri maupun para stakeholder yang terkait. Program ini dapat diwujudkan salah satunya dengan melihat kinerja lingkungan perusahaan. Program CSR yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. (Susliyanti, 2007). Salah satu program berkelanjutan, yaitu pada PT Djarum yang melakukan program CSR di bidang bulutangkis dengan mendirikan sekolah bulutangkis, membuat klub, memberikan beasiswa, rutin melaksanakan aneka lomba dan mensponsorinya. Program CSR lainnya seperti yang dilakukan oleh PT Unilever, yaitu dengan mendaur ulang limbah plastik produknya menjadi barang bernilai ekonomis, seperti tas dengan memberdayakan masyarakat/ yang disebut dengan mitra masyarakat binaan di 10 kota besar di Indonesia.

Survei yang dilakukan Booth-Harris Trust Monitor (2001) menunjukkan mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif. Kunci untuk sukses

dalam pertumbuhan perusahaan ialah membangun pilihan konsumen atas produk atau merk yang spesifik (Dess, Lumpkin, Eisner, 2008).

Pertumbuhan ditandai dengan adanya peningkatan penjualan yang kuat (Dess, 2008). Penjualan yang kuat akan berefek pada peningkatan profit yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan juga. Selain itu, berdasar penelitian Sriwardany tahun 2007, terdapat hubungan antara pertumbuhan perusahaan dan struktur modal terhadap harga saham. Salah satu pembentuk nilai perusahaan adalah harga saham. Dengan demikian, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.4 Hipotesis

Tujuan utama perusahaan ialah mensejahterakan para pemegang sahamnya. Nilai perusahaan yang baik mengindikasikan bahwa kesejahteraan perusahaan tersebut baik. Dengan demikian mampu memuaskan para pemegang saham. Survei yang dilakukan Booth-Harris Trust Monitor (2001) menunjukkan mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif. Hal ini dapat berakibat buruk bagi nilai perusahaan. Kinerja lingkungan perusahaan yang baik mampu memberikan citra yang baik bagi perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

. Perbedaan harga saham perusahaan yang tumbuh dan tidak tumbuh terbentuk atas suatu keyakinan bahwa keuntungan dan aliran kas dimasa depan perusahaan yang tumbuh lebih besar daripada perusahaan yang tidak tumbuh (Sriwardany, 2006). Harga saham yang tinggi menunjukkan nilai perusahaan yang tinggi. Pertumbuhan ditandai dengan adanya peningkatan penjualan yang kuat (Dess, 2008). Penjualan yang tinggi pada akhirnya akan meningkatkan profit perusahaan. Dengan demikian, kesejahteraan perusahaan semakin baik, yang berarti nilai perusahaan juga semakin meningkat. Selain itu, berdasar penelitian Sriwardany tahun 2007, terdapat hubungan antara pertumbuhan perusahaan dan struktur modal terhadap harga saham. Harga saham merupakan salah satu pembentuk nilai perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

H₃: Struktur perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdapat dalam rating PROPER Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2007-2009 serta terdaftar di BEI dengan rentang waktu 2007-2009.

3.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel atau lebih (Marzuki, 1999). Dengan penelitian asosiatif dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala/fenomena. Dalam penelitian asosiatif terdapat tiga jenis hubungan variabel, yaitu simetris, kausal, dan interaktif. Pada penelitian ini, hubungan yang terjadi adalah hubungan kausal.

Jenis data yang akan dikumpulkan berupa data sekunder dan bersifat kuantitatif. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan untuk periode 2007 dan 2009 pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI serta pengumuman PROPER KLH tahun 2007-2009.

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Kinerja Lingkungan

a. Variabel konseptual

Rating PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan upaya perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup.

b. Variabel operasional

Kinerja lingkungan diukur dengan pengumuman dari PROPER KLH. Rating yang diberikan oleh PROPER KLH ada 5 (lima) macam, yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam.

Data dikategorisasikan sebagai data interval, yaitu data yang bukan hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Nilai untuk setiap peringkat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Nilai Peringkat PROPER

Peringkat	Nilai
Emas	5
Hijau	4
Biru	3
Merah	2
Hitam	1

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup (2009), data diolah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 5 lebih tinggi dari 4, dan 4 lebih tinggi dari 3, dan seterusnya.

2. Pertumbuhan Perusahaan

a. Variabel konseptual

Pertumbuhan ditandai dengan adanya peningkatan penjualan yang kuat (Dess, 2008). Pertumbuhan perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut terus berkembang.

b. Variabel operasional

Menurut Asih (2006), pertumbuhan perusahaan yang diberi simbol *GROW* diukur dengan menggunakan hasil bagi antara selisih total aktiva tahun ke-t dan total aktiva tahun ke-t-1 dengan total aktiva tahun ke-t-1.

$$GROW = \frac{TA_t - TA_{t-1}}{TA_{t-1}}$$

Keterangan:

GROW = Pertumbuhan perusahaan

TA_t = Total aktiva tahun ke-t

TA_{t-1} = Total aktiva tahun ke-(t-1)

3. Struktur Perusahaan

a. Variabel konseptual

Struktur perusahaan merupakan proporsi penggunaan dana eksternal (hutang) dan dana internal

(asset) oleh perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya.

b. Variabel operasional

Cara pengukuran struktur perusahaan (Sriwardhany, 2007), yaitu:

$$\text{Capital Structure} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

4. Nilai Tobins'Q

a. Variabel konseptual

Nilai Tobins'Q adalah suatu rasio yang dipikirkan oleh James Tobin dari Yale University pemenang nobel bidang ekonomi sebagai ukuran penilaian pasar. Ia menghipotesiskan bahwa nilai pasar yang dikombinasikan dari semua perusahaan pada bursa saham harus sepadan dengan nilai gantinya.

b. Variabel operasional

Perhitungannya yaitu:

$$Q = \frac{(P) (N) + D}{BVA}$$

Q : nilai perusahaan

P : harga pasar saham (*closing price*)

N	:	jumlah lembar saham yang beredar
D	:	nilai buku total hutang
BVA	:	nilai buku total aktiva

3.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan bahan atau keterangan untuk penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu, melalui sumber-sumber dokumen.

Data mengenai tanggung jawab sosial perusahaan didapat dari pengumuman PROPER KLH, yaitu pada alamat *website* resmi Kementerian Lingkungan Hidup di <http://www.menhl.go.id>. Sementara itu, data laporan keuangan diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* tahun 2007-2009.

3.5 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2009. Sementara itu, sampel dari penelitian ini diambil dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memilih obyek

penelitian sesuai dengan informasi yang diperlukan. Berikut ini adalah kriteria atau pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan sampel tersebut:

1. Selama periode 2007-2009, sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan tersebut termasuk dalam rating yang diumumkan oleh PROPER Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2007-2009.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik ini di antaranya:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik-titik) pada *Normal P-Plot Of Regresion Standardzed Residual* dari variabel independen dimana:

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/ atau tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan di mana terjadi hubungan *linier* yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan *linear* antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Menurut santoso (2001), pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

Uji autokorelasi dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan uji Durbin-Watson (Uji DW). Ada cara lain untuk menguji autokorelasi, yaitu dengan uji *Lagrange Multiplier* (Uji LM). Namun uji tersebut lebih cocok untuk sampel besar di atas 100 observasi. Oleh karena itu, peneliti lebih memilih uji DW untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tabel Kriteria Uji Durbin-Watson

Interval	Kriteria
$dW < dL$	Ada autokorelasi
$dL \leq dW \leq dU$	Daerah Keragu-raguan
$dU < dW \leq 4 - dU$	Tidak ada autokorelasi
$4 - dU < dW \leq 4 - dL$	Daerah Keragu-raguan
$dW > 4 - dL$	Ada autokorelasi

Sumber : Duwi Priyatno (2010), data diolah

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen), yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya

pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED.

Berikut ini adalah dasar analisisnya:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada memebentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Demi menjamin keakuratan hasil, maka dilakukan pula uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual teradap variabel independen (dalam Gujarati & Ghozali, 2005). Jika tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt) yang ditunjukkan dengan probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi tidak memiliki gangguan heteroskedastisitas.

3.5.2 Analisis Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y) (Duwi, 2010).

Persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$FV = a + b_1\text{PROPER} + b_2\text{CG} + b_3\text{CS}$$

Keterangan:

FV = *Firm Value* (Nilai Perusahaan)

PROPER = Kinerja Lingkungan Perusahaan

CG = *Company Growth* (Pertumbuhan Perusahaan)

CS = *Capital Structure* (Struktur Modal)

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi

3.5.3 Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan dua alat uji, di antaranya:

1. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Rumus t hitung pada analisis regresi adalah:

$$T \text{ hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Keterangan:

b_i = Koefisien regresi variabel i

S_{b_i} = Standar error variabel i

Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ maka secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Namun, bila tingkat signifikansi $\leq 0,05$ berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Selain itu, pengujian juga dapat diketahui dengan mencari nilai t hitung dan t tabel dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a. H_a diterima jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$
- b. H_a ditolak jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$

H_a merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa secara parsial ada pengaruh antara tiap variabel X dengan variabel Y.

2. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansinya. Jika nilainya kurang dari 5% atau 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel independen (Y).

Selain itu, berpengaruh atau tidaknya dapat dilihat dengan membandingkan F hitung dan F tabel. F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data atau kasus

k = Jumlah variabel independen

Uji F menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a. H_a diterima bila $F_{hitung} > F_{tabel}$
- b. H_a ditolak bila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

H_a menyatakan bahwa ada pengaruh antara variabel-variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y.

Alat analisis yang digunakan untuk memproses data penelitian menjadi kesimpulan statistik ialah SPSS 17 *for Windows*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini meneliti tiga variabel X, yaitu peringkat PROPER, pertumbuhan perusahaan, dan struktur perusahaan serta satu variabel Y, yaitu nilai perusahaan. Perusahaan yang terdaftar baik pada BEI dan PROPER tahun 2007-2009 ada 44 perusahaan. Dari total perusahaan tersebut, yang memenuhi persyaratan berjumlah 14 perusahaan. Peneliti menggunakan data laporan keuangan selama periode 2007-2009. Berikut ini adalah tabel mengenai proses penentuan sampel perusahaan:

Tabel 4.1 Penentuan Sampel Perusahaan

No.	Karakteristik Sampel	Jumlah
1	Perusahaan yang terdaftar di BEI dan PROPER (2009)	44
2	Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan	30
3	Jumlah sampel perusahaan	14

4	Data laporan keuangan tahunan yang digunakan, periode 2007-2009 (3 x 14 = 42)	42
---	---	----

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2011)

4.2 Uji Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah hasil dari uji statistik deskriptif atas variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Lingkungan	42	1	5	3,216	1,134
Pertumbuhan Perusahaan	42	0,055	13,030	0,593	2,107
Struktur Modal	42	0,194	0,816	0,450	0,181
Nilai Perusahaan	42	0,636	9,672	2,222	1,889

Sumber: SPSS, data diolah (2011)

Tabel di atas menunjukkan variabel kinerja lingkungan selama periode 2007-2009 memiliki rata-rata sebesar 3,216. Hal ini memperlihatkan, bahwa rata-rata penilaian perusahaan yang menjadi

sampel adalah nilai warna BIRU. Nilai minimum variabel ini adalah 1 yang berarti berada pada peringkat hitam dan nilai maksimumnya adalah 5 atau berada pada peringkat emas, sedangkan standar deviasinya bernilai 1,134.

Sementara itu, rata-rata pertumbuhan perusahaan yang terdiri dari 14 sampel perusahaan periode 2007 sampai 2009 sebesar 0,593. yang berarti rata-rata pertumbuhan perusahaan sebesar 59,3%. Pertumbuhan paling rendah tercatat sebesar 0,055 atau 5,5%, sedangkan pertumbuhan paling tinggi sebesar 13,030 atau 130%. Nilai standar deviasi sebesar 2,107, artinya data yang berkisar lebih atau kurang sebesar 2,107 dari rata-ratanya dapat dikatakan kelompok data tersebut berdistribusi normal.

Pada variabel struktur modal, menunjukkan rata-rata sebesar 0,450. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi dana eksternal yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya sebesar 45%. Proporsi penggunaan dana eksternal terbesar ialah 0,816, sedangkan yang terkecil sebesar 0,194. Standar deviasi variabel ini sebesar 0,181.

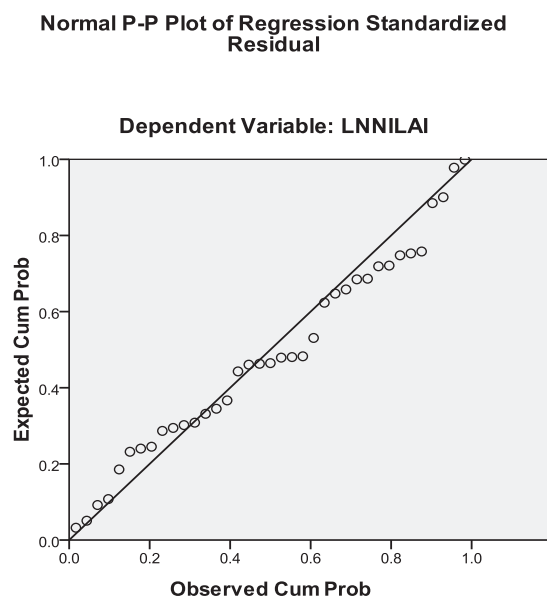
Selanjutnya variabel nilai memiliki rata-rata sebesar 2,222. Variabel ini memiliki nilai maksimum sebesar 9,672 dan nilai minimum 0,636. Standar deviasi variabel ini sebesar 1,889, artinya data yang berkisar lebih atau kurang sebesar 1,889 dari rata-ratanya dapat dikatakan kelompok data tersebut berdistribusi normal.

4.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data dapat diketahui dengan memperhatikan penyebaran data (titik-titik) pada *Normal P-Plot Of Regression Standardzed Residual* dari variabel dependen.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Grafik Normal P-P Plot

Dari grafik normal *P-P Plot* tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear (korelasi) antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* $< 0,10$ atau (2) nilai *variance inflation factor* (VIF) > 10 . Jika diketahui nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , maka tidak ada gejala multikolinearitas.

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Uji Multikolineritas

No.	Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
1	Kinerja Lingkungan	0,952	1,050
2	Pertumbuhan Perusahaan	0,881	1,135
3	Struktur Modal	0,853	1,173

Sumber: SPSS, data diolah (2011)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa nilai *tolerance* variabel kinerja lingkungan sebesar 0,952 dengan VIF sebesar 1,050. Variabel pertumbuhan perusahaan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,881 dengan VIF 1,135. Sedangkan variabel struktur modal memiliki nilai *tolerance*

sebesar 0,853 dan nilai VIF sebesar 1,173. Berdasarkan data tersebut, ketiga variabel ini memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresinya.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autorelasi. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi adalah dengan melakukan uji *durbin watson* (DW). Untuk taraf signifikansi 5% dengan $k= 3$ dan $n= 37$ diperoleh $dL = 1,307$ dan $dU = 1,655$, sehingga diperoleh $4-dU = 2,693$ dan $4-dL = 2,345$

Setelah dilakukan pengujian autokorelasi dengan menggunakan SPSS versi 17.0 for Windows, hasil autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,778

Sumber: SPSS, data diolah (2011)

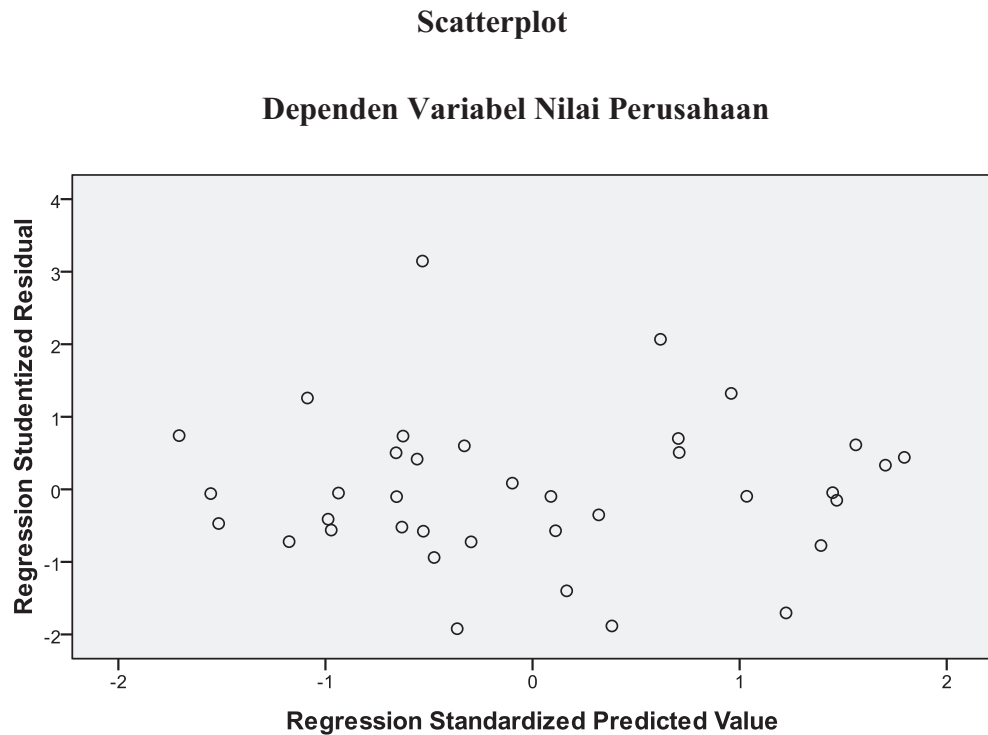
Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diperoleh nilai dW adalah sebesar 1,778. Jika data tersebut disesuaikan dengan tabel 4.5 tentang dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi, nilai dW terletak pada $1,655 < dW \leq 2,345$ sehingga model regresi menunjukkan tidak ada masalah autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Salah satunya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen), yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Titik-titik yang menyebar pada grafik *scatterplot* dapat menjadi indikasi bahwa tidak adanya gangguan heteroskedastisitas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini:



Gambar 4.2 Grafik *Scatterplot*

Grafik *scatterplot* memperlihatkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas.

Demi lebih menjamin keakuratan, maka dilakukan uji statistik menggunakan uji Glejser. Model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas apabila probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

Hasil uji Glejser dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Uji Glejser

Model	Signifikansi
Peringkat PROPER	0,256
Pertumbuhan Perusahaan	0,954
Struktur Modal	0,813

Sumber: SPSS, data diolah (2011)

Hasil uji ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen masing-masing memiliki nilai probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y) (Duwi, 2010). Persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$FV = a + b_1\text{PROPER} + b_2\text{CG} + b_3\text{CS}$$

Keterangan:

FV = *Firm Value* (Nilai Perusahaan)

PROPER = Kinerja Lingkungan Perusahaan

CG = *Company Growth* (Pertumbuhan Perusahaan)

CS = *Capital Structure* (Struktur Modal)

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi

Berikut ini adalah hasil analisis regresi yang diproses dalam SPSS:

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficient</i>
<i>Constanta</i>	-0,154
Peringkat PROPER	0,084
Pertumbuhan Perusahaan	0,033
Struktur Modal	-0,752

Sumber: SPSS, data diolah (2011)

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.6 di atas maka dapat dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,154 + 0,084X_1 + 0,033X_2 - 0,752X_3$$

Dari persamaan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar $-0,154$; artinya jika semua variabel independen (kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal) nilainya adalah 0 (nol), maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar $0,154$.
- b) Koefisien regresi variabel kinerja lingkungan (X_1) sebesar $0,084$; artinya jika kinerja lingkungan mengalami kenaikan peringkat sebesar 1 tingkat, maka nilai perusahaan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar $0,084$ dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kinerja lingkungan dengan nilai perusahaan, semakin meningkat kinerja lingkungan, maka semakin tinggi nilai perusahaan.
- c) Koefisien regresi variabel pertumbuhan perusahaan (X_2) sebesar $0,033$; artinya jika pertumbuhan perusahaan mengalami kenaikan 1% dan variabel independen lainnya tetap, maka nilai perusahaan (Y) akan meningkat sebesar $0,033$. Koefisien bernilai positif, artinya semakin meningkat pertumbuhan perusahaan, maka semakin meningkat pula nilai perusahaan.
- d) Koefisien regresi variabel struktur modal (X_3) sebesar $-0,752$; artinya jika struktur modal meningkat sebesar 1 dan variabel independen lain nilainya diasumsikan tetap, maka nilai perusahaan

(Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,752. Koefisien bernilai negatif, artinya jika nilai struktur modal atau proporsi penggunaan utang meningkat, maka nilai perusahaan akan semakin menurun.

4.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,165

Sumber: SPSS, data diolah (2011)

Dari tampilan *output SPSS model summary*, besarnya *adjusted R²* adalah 0,165. Hal ini berarti hanya 16,5 % variasi nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen (kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal). Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

4.6 Uji Hipotesis

1 Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh *output* ANOVA pada Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8 Uji ANOVA (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	3,779	3	1,260	3.371	0.030 ^a
Residual	12,331	33	0,374		
Total	16,110	36			

Sumber: SPSS, data diolah (2011)

Dari uji ANOVA atau F test didapatkan nilai F hitung sebesar 3,371 dengan probabilitas 0,030. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan F hitung > dari F tabel ($3,371 > 2,892$), maka dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2. Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t-tabel diperoleh sebesar 2,035

Tabel 4.9 Uji t (*t-test*)

Model	t	Sig.
Kinerja Lingkungan	0,405	0,688
Pertumbuhan Perusahaan	0,274	0,786
Struktur Modal	-2,914	0,006

Sumber: SPSS, data diolah (2011)

a) Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara kinerja lingkungan (PROPER) terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil uji t, didapatkan nilai t-hitung sebesar $0,405 < t$ tabel pada signifikansi 0,688 yang berarti lebih besar dari 5%, sehingga hipotesis ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis pertama tidak terbukti

b) Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua penelitian ini, yaitu terdapat hubungan antara pertumbuhan perusahaan dengan nilai perusahaan. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung sebesar $0,274 < t\text{-tabel}$ dengan signifikansi sebesar 0,786 yang berarti lebih besar dari 5% atau 0,05, sehingga hipotesis ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan atau dapat dikatakan hipotesis kedua tidak terbukti.

c) Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara struktur modal terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel 4.11, nilai t-hitung sebesar $-2,914 < -t\text{ tabel}$ pada signifikansi sebesar 0,006 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, sehingga hipotesis diterima. T hitung negatif, artinya struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ini terbukti, yaitu struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara negatif.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan data hasil penelitian yang diolah dengan sumber dari laporan keuangan tahunan yang terdaftar di BEI dan mengikuti PROPER selama periode 2007-2009, maka pembahasan kali ini akan membahas hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah diajukan sebelumnya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada pengujian parsial diketahui bahwa hanya variabel struktur modal yang berpengaruh negatif secara signifikan. Sementara itu, kedua variabel lainnya, yakni kinerja lingkungan dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan.

1. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji t (t -test), didapatkan nilai t -hitung sebesar 0,405 dengan signifikansi 0,688 yang menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak atau dapat dikatakan bahwa kinerja lingkungan yang diukur dengan PROPER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2009.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susliyanti (2007) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara CSR yang juga diukur

dengan PROPER dengan nilai perusahaan pada perusahaan di Indonesia. Meskipun kinerja lingkungan berkorelasi positif dengan nilai perusahaan, namun pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan karena kurang kuatnya peraturan mengenai pencemaran lingkungan hidup serta hukuman yang cukup untuk menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Meskipun di Indonesia telah ada UU RI No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, namun hal ini dirasa belum cukup untuk mencegah kerusakan lingkungan oleh para pengusaha. Masih lekat dalam ingatan kita kasus-kasus besar pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia seperti kasus PT Newmont di Teluk Buyat atau kasus lumpur Lapindo yang tak kunjung selesai.

Ketidakpedulian perusahaan terhadap lingkungan bisa saja karena mereka tidak menganggap hal ini sebagai sesuatu yang beresiko bagi perusahaan mereka karena kebanyakan investor lebih tertarik untuk mengetahui laba perusahaan dibandingkan dengan itikad baik perusahaan dalam pelestarian lingkungan.

2. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Dalam pengujian hipotesis dengan uji t (*t-test*), didapatkan nilai t-hitung sebesar 0,274 dengan signifikansi 0,786 yang menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini ditolak, atau dapat

dikatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2007-2009. Hasil t-hitung menunjukkan ada korelasi positif antara pertumbuhan perusahaan dan nilai perusahaan namun tidak signifikan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kim (2009) yang menyatakan bahwa pertumbuhan berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini bisa saja disebabkan karena adanya perbedaan sampel dalam penelitian. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada perusahaan-perusahaan *real estate*.

Pada beberapa perusahaan, pertumbuhan di tahun 2008 melesat tinggi dibanding tahun sebelumnya, namun untuk tahun berikutnya pertumbuhan perusahaan tidak lagi setinggi pada tahun 2008. Perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhannya dengan meningkatkan penjualan dan melakukan ekspansi. Untuk melakukan ekspansi, diperlukan dana yang besar, salah satunya dari hutang. Pada penelitian sebelumnya, Kusumawati (dalam Lailatul, 2006) menyatakan bahwa nilai perusahaan meningkat ketika *leverage* dinaikkan dan kemudian menurun ketika *leverage* mencapai titik yang sangat ekstrim.

3. Pengaruh Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan

Dalam pengujian hipotesis dengan uji t (*t-test*), didapatkan nilai t-hitung sebesar -2,914 dengan signifikansi 0,006 yang menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima, yaitu struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2007-2009.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra (2007) yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan pada sektor industri barang konsumsi, sektor *property & real estate*, serta transportasi dan infrastruktur. Namun sedikit berbeda dengan penelitian Mas'ud (2008) yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif dengan nilai perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lailatul (2006) juga menyatakan bahwa peningkatan hutang pada struktur modal diikuti dengan peningkatan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya korelasi negatif antara struktur modal dan nilai perusahaan didukung oleh teori *pecking-order* yang lebih memilih untuk menggunakan dana internal dan sedikit bergantung pada sumber dana eksternal. Dengan demikian semakin kecil proporsi hutang dalam struktur modal, maka nilai perusahaan semakin besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan, diantaranya:

1. Variabel kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap nilai perusahaan.
2. Kinerja lingkungan yang diukur dengan peringkat PROPER berkorelasi positif namun tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar pada BEI.
3. Pertumbuhan perusahaan berkorelasi positif namun tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar pada BEI dan mengikuti PROPER.
4. Struktur modal terbukti berpengaruh signifikan secara negatif terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI dan mengikuti PROPER. Kenaikan nilai pada variabel struktur modal akan

menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin meningkat hutang atau sumber pendanaan eksternal, maka akan menyebabkan penurunan nilai perusahaan.

5. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,165, berarti hanya 16,5 % variasi nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel kinerja lingkungan, pertumbuhan perusahaan, dan struktur modal. Sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya:

1. Penilaian kinerja lingkungan oleh PROPER dilakukan pada setiap cabang perusahaan. Penulis kesulitan memberikan skor untuk perusahaan yang memiliki peringkat yang berbeda pada tiap cabang perusahaan.
2. Sampel perusahaan kurang spesifik sehingga sulit membandingkan kinerja lingkungan pada jenis industri yang berbeda.
3. Jumlah sampel perusahaan yang terlalu sedikit, yaitu hanya empat belas perusahaan.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan, di antaranya:

1. Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) diharapkan dapat mengikutsertakan lebih banyak perusahaan untuk mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), terutama perusahaan-perusahaan *go-public*.
2. Pemerintah diharapkan lebih meningkatkan pengawasan terkait dengan pelestarian lingkungan serta memperketat aturan dengan memberi hukuman setimpal bagi para pelanggar. Selain itu, ada baiknya pemerintah juga memberikan insentif ekonomis kepada perusahaan yang beritikad baik dalam pelestarian lingkungan.
3. Variabel struktur modal memiliki korelasi negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga disarankan bagi perusahaan untuk tidak terlalu mengandalkan sumber dana eksternal agar mampu meningkatkan nilai perusahaan.
4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mampu menggunakan pengukuran kinerja lingkungan selain hasil publikasi PROPER KLH. Selain itu, akan lebih baik jika semua perusahaan yang

menjadi sampel adalah perusahaan yang sejenis agar kinerja lingkungan perusahaan dapat benar-benar dibandingkan.

5. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya, seperti kinerja keuangan, pengungkapan CSR, *Good Corporate Governance*, serta *Firm Size*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi – Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amanah, Lailatul. 2006. *Analisis Struktur Modal dan Nilai dengan Tobins' Q*.
- Chandra, Teddy. 2007. *Pengaruh Struktur Modal terhadap Produktifitas Aktiva, Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan*.
- Dess, Lumpkin & Eisner. 2008. *Strategic Management text and cases 4th edition International Edition*. China: Mc Graw-Hill/Irwin.
- Emery, Douglas R, John D. Finnerty, John D. Stowe. 2007. *Corporate Financial Management Third Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hill, Charles W.L. 2008. *Global Business Today Fifth Edition*. New York: Mc Graw-Hill.
- Horne, James C. Van dan John Wachowicz, JR. 2007. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Ed.12 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keraf, Sonny. 2006. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Liow, Kim Hiang. 2009. *Firm Value, Growth, Profitability, and Capital Structure of Listed Real Estate Companies: An International Perspective*. Journal of Property Research Volume 27, No.2, June 2010, 199-194.
- Mas'ud , Masdar. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal dan Hubungannya terhadap Nilai Perusahaan*.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.
- Ross, Westerfield, and Jordan. 2009. *Pengantar Keuangan Perusahaan Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sriwardany, Ade Fatma Lubis, dan Muhammad Umongdang Bulan. 2006. *Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pelaksanaan Struktur Modal Dan*

Dampaknya Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Tbk.

Suratmo, F Gunarwan. 2004. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Susliyanti, Eni Dwi. 2007. *Keterkaitan antara Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Kinerja dan Nilai Perusahaan*. Wahana Akuntansi Jurnal Ilmiah Volume 2.

Yuniasih, Ni Wayan dan Made Gede Wirakusuma. 2007. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Pemoderasi.

Yusgiantoro, Purnomo. 2004. *Manajemen Keuangan Internasional Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi UI.

Sumber Internet:

Anonim. [Http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/01/teropong/2921326](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/01/teropong/2921326). Diakses tanggal 25 desember 2010.

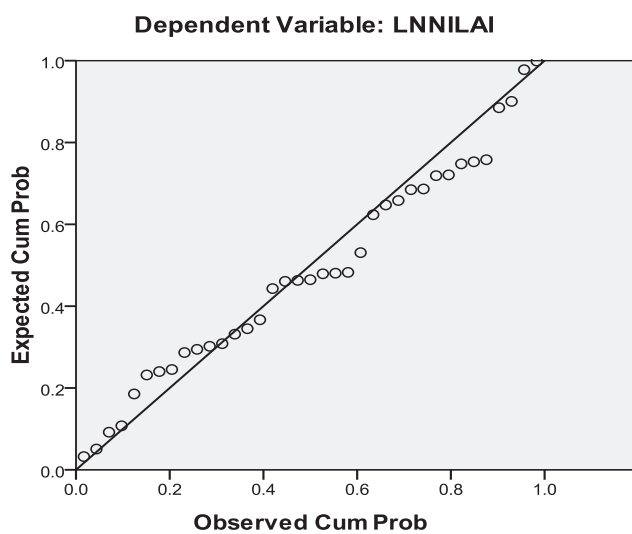
[Http://www1.menlh.go.id/proper/proper%20baru/Index.html](http://www1.menlh.go.id/proper/proper%20baru/Index.html). Diakses tanggal 24 Desember 2010.

Sutopoyudo. <http://www.wordpress.com/2009/09/21>. Diakses tanggal 27 Desember 2010.

LAMPIRAN 1

UJI NORMALITAS

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.154	.320		-.480	.635		
	LNPRGKT	.084	.208	.063	.405	.688	.952	1.050
	LNSTRKTR	-.752	.258	-.481	-2.914	.006	.853	1.173
	LNPRTMB	.033	.119	.044	.274	.786	.881	1.135

a. Dependent Variable: LNNILAI

VIF < 10 atau Tolerance > 0,10

UJI AUTOKOLINEARITAS

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.484 ^a	.235	.165	.61128	1.778

a. Predictors: (Constant), LNPRMTB, LNPRGKT, LNSTRKTR

b. Dependent Variable: LNNILAI

Dl 1,307

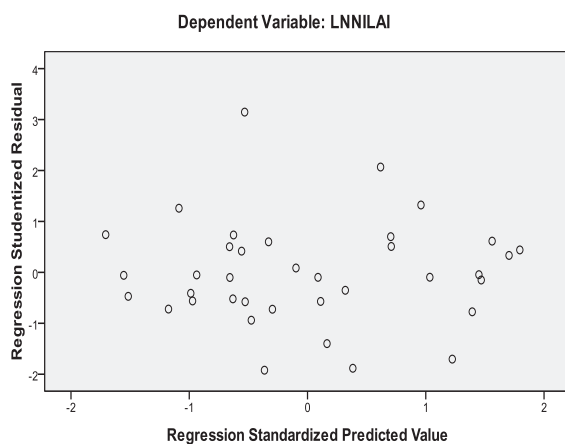
4-dl 2,693

Du 1,655

4-du 2,345

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Scatterplot



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.300	.211		1.426	.163		
	LNPRGKT	.158	.137	.202	1.156	.256	.952	1.050
	LNSTRKTR	.041	.170	.044	.239	.813	.853	1.173
	LNPRMTB	.005	.078	.011	.058	.954	.881	1.135

a. Dependent Variable: ABS

UJI F**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.779	3	1.260	3.371	.030 ^a
	Residual	12.331	33	.374		
	Total	16.110	36			

a. Predictors: (Constant), LNPRTMB, LNPRGKT, LNSTRKTR

b. Dependent Variable: LNNILAI

F tabel sama dengan 2,892, F hitung 3,371

F hitung > F Tabel = Berpengaruh secara simultan

UJI t**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.154	.320		-.480	.635		
	LNPRGKT	.084	.208	.063	.405	.688	.952	1.050
	LNSTRKTR	-.752	.258	-.481	-2.914	.006	.853	1.173
	LNPRTMB	.033	.119	.044	.274	.786	.881	1.135

a. Dependent Variable: LNNILAI

LAMPIRAN 2

Berikut ini adalah daftar perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

Daftar Sampel perusahaan

No.	Perusahaan
1	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
2	PT Kalbe Farma Tbk.
3	PT Unilever Indonesia Tbk.
4	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
5	PT Charoen Pokhpan Indonesia Tbk.
6	PT Budi Acid Jaya Tbk.
7	PT Adaro Energy Tbk.
8	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
9	PT Titan Petrokimia Nusantara Tbk.
10	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
11	PT Holcim Indonesia Tbk.
12	PT Semen Gresik (Persero) Tbk.
13	PT Lippo Cikarang Tbk.
14	PT Astra International Tbk.

Sumber: Data Sekunder, 2011

LAMPIRAN 3

Berikut ini adalah data-data perusahaan sampel selama periode 2007-2009:

Kode	Tahun	Peringkat	Pertumbuhan	Struktur	Nilai Perusahaan
CPIN	2007	1	0,302869659	0,77355382	1,504914323
	2008	1	0,533629226	0,742332395	1,018237228
	2009	1	0,093745833	0,448220773	1,829739767
ULTJ	2007	1	0,349089472	0,389257648	1,766867694
	2008	1	0,209271388	0,35136536	1,695582715
	2009	1	0,184441295	0,346099906	1,312949116
BUDI	2007	3	0,258540341	0,552858646	1,323763118
	2008	3	0,149366288	0,618489478	0,912401577
	2009	3	0,148290546	0,510500843	1,039228579
ADRO	2007	4	0,189224367	0,815575229	0,815575229
	2008	4	0,560688678	0,583999013	1,044055756
	2009	4	0,488905183	0,587618845	1,890696264
PTBA	2007	3	0,37522068	0,32457081	7,273131883
	2008	4	0,749874329	0,332231046	2,935815907
	2009	4	0,239962762	0,283804897	5,203764129
FPNI	2007	3	0,093120708	1,027979873	10,21120845
	2008	4	13,03038778	0,596559095	0,724666649
	2009	4	0,096772419	0,50614192	0,862875633
INTP	2007	4	0,157828154	0,311117026	3,318314913
	2008	5	0,335468791	0,244976325	1,745292421
	2009	5	0,081382155	0,193734837	3,992457993
SMCB	2007	4	0,254480076	0,686837027	2,54721576
	2008	4	0,422420162	0,658188071	1,246278681
	2009	4	0,112866674	0,543562843	2,17837312
SMGR	2007	4	0,100018011	0,21087412	4,111711056
	2008	4	0,271752846	0,22911037	2,564692759
	2009	4	0,178380956	0,203316453	3,661112067
KAEF	2007	3	0,080339679	0,345206993	1,566756254
	2008	3	0,143340734	0,344411242	0,636389356
	2009	3	0,055210727	0,363049356	0,814442365
KLBF	2007	3	0,153726808	0,218274135	2,708746635
	2008	3	0,124549209	0,238312945	0,950536897
	2009	3	0,153602359	0,260977838	2,29768076
UNVR	2007	3	0,106716743	0,49485957	10,15144675
	2008	3	0,241764363	0,522375543	9,671709198
	2009	3	0,171337359	0,504531736	11,76860824
LPCK	2007	3	0,314732161	0,642937392	0,98974767
	2008	3	0,741867218	0,662634534	0,764446354
	2009	3	0,168503533	0,678627613	0,779593429
ASII	2007	4	0,259810232	0,496095718	2,236021727
	2008	4	0,38301298	0,497436215	1,026419972
	2009	4	0,015062227	0,449818975	2,029323005

Sumber: Data Sekunder (2011), data diolah



SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diberikan penghargaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pencapaian kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2010 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Proper merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan Proper.
- (3) Pemberian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam:
 - a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berdasarkan pada kriteria penilaian Proper.
- (2) Kriteria Penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
 - b. kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) untuk pemeringkatan hijau dan emas sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peringkat kinerja usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa,

- melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat;
- b. hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (*CSR/Comdev*) dengan baik;
 - c. biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - d. merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - e. hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penilaian Proper, Menteri membentuk:
 - a. dewan pertimbangan Proper; dan
 - b. tim teknis Proper.
- (2) Dewan pertimbangan Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kredibilitas, berwawasan luas, dan independen;
 - b. tidak mempunyai hubungan financial dengan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai peringkat kinerjanya, termasuk sebagai pemilik saham atau kreditor;
 - c. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dinilai peringkat kinerjanya;
 - d. bukan merupakan konsultan, penyusun dokumen Amdal, rekan bisnis signifikan dari usaha dan/atau kegiatan yang dinilai peringkat kinerjanya; dan
 - e. tidak ada bagian dari kegiatan yang dibiayai oleh perusahaan peserta Proper.
- (3) Tim Teknis Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas unsur:
 - a. Unit kerja eselon I Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangi pengendalian pencemaran; dan
 - b. Unit kerja eselon I Kementerian Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (4) Susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi Dewan pertimbangan Proper dan tim teknis Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Penilaian Proper dilaksanakan sesuai tahapan:
 - a. penetapan daftar usaha dan/atau kegiatan oleh tim teknis Proper;
 - b. pelaksanaan inspeksi lapangan;
 - c. penyusunan rapor sementara;
 - d. pelaksanaan evaluasi peringkat sementara;
 - e. pemberitahuan hasil peringkat sementara;
 - f. pembahasan sanggahan;
 - g. penetapan peringkat sementara;
 - h. penetapan kandidat hijau;
 - i. pelaksanaan evaluasi peringkat hijau; dan
 - j. penyampaian usulan penetapan peringkat akhir.
- (2) Pelaksanaan penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Pedoman dan tata cara penilaian kinerja usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Berdasarkan usulan penetapan peringkat akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri menetapkan dan mengumumkan peringkat Proper.

Pasal 8

- (1) Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaan penilaian Proper kepada gubernur.
- (2) Gubernur yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan kriteria dan tata cara penilaian Proper sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

Pasal 9

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sedang:

- a. melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- b. dalam proses penegakan hukum

tidak dilakukan penilaian Proper.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meraih peringkat emas dan hijau diberikan trophy dan sertifikat penghargaan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang meraih peringkat biru diberikan sertifikat penghargaan.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian Proper dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2010 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 519 Tahun 2009 tentang Pedoman

dan Kriteria Penentuan Peringkat Hijau dan Emas pada Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2011

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Inar Ichsana Ishak

Lampiran 1
 Peraturan Menteri Negara
 Lingkungan Hidup
 Nomor : 05 Tahun 2011
 Tanggal : 11 Oktober 2011

KRITERIA PENILAIAN
 PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)
 BIRU, MERAH, DAN HITAM

A. PELAKSANAAN AMDAL ATAU UKL/UPL

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
1.	Pelaksanaan Amdal/UKL-UPL	1. Memiliki Amdal/UKL-UPL 2. Melaksanakan ketentuan dalam: a. SK Kelayakan Lingkungan b. ANDAL, RKL-RPL c. UKL UPL 3. Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL/ UKL -UPL	1. Tidak Melaksanakan ketentuan dalam: a. SK Kelayakan Lingkungan b. ANDAL, RKL-RPL c. UKL-UPL 2. Tidak Melaporkan pelaksanaan RKL-RPL/ UKL-UPL	Tidak Memiliki Amdal/ UKL-UPL

B. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
1.	Ketaatan Terhadap Titik Penaatan	Memantau seluruh titik penaatan dan/atau air buangan yang harus dikelola sesuai dengan peraturan.	Memantau seluruh titik penaatan	Terdapat titik penaatan dan/atau air buangan yang tidak dipantau
2.	Ketaatan Terhadap Parameter	1. Memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan: a. IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair) b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah c. Baku Mutu Nasional atau Provinsi 2. Ketaatan diukur berdasarkan	Terdapat parameter yang tidak diukur sesuai persyaratan baku mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan: a. IPLC b. Izin Pemanfaatan (land application) c. Baku Mutu Nasional atau Provinsi	Semua parameter tidak di pantau sesuai dengan: a. IPLC b. Izin Pemanfaatan (land application) c. Baku Mutu Nasional atau Provinsi

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		<p>peraturan/persyaratan yang lebih ketat.</p> <p>3. Khusus Rumah Sakit untuk periode 2010-2011 jumlah parameter yang dipersyaratkan sebanyak 5 parameter: pH, BOD, COD, TSS, E-Coli</p>		
3.	Ketaatan Terhadap Pelaporan	<p>Melaporkan data secara lengkap dan periodik setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas air limbah bulanan 2. Data pemantauan harian parameter COD dan pH untuk Industri petrokimia 3. Data pemantauan harian parameter pH dan TSS atau debit untuk Industri pertambangan 4. Produksi bulanan (riil) atau bahan baku 5. Catatan debit harian air limbah yang dibuang <p>Khusus Rumah Sakit dan Hotel untuk periode 2010-2011 pemantauan kualitas air limbah diperbolehkan dilakukan per 3 bulan.</p>	<p>Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan antara $80\% \leq n < 100\%$ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas air limbah yang dilakukan setiap bulan 2. Produksi bulanan (riil) atau bahan baku; 3. Catatan debit harian air limbah yang dibuang 4. Data pemantauan harian parameter COD dan pH untuk jenis industri tertentu (khusus industri petrokimia) 5. Data pemantauan harian parameter pH dan debit/TSS untuk jenis industri pertambangan 	<p>A. Melaporkan data sesuai dengan yang dipersyaratkan $n < 80\%$ sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas air limbah yang dilakukan setiap bulan 2. Produksi bulanan (riil) 3. Catatan debit harian air limbah yang dibuang 4. Data pemantauan harian parameter COD dan pH untuk jenis industri tertentu (khusus industri petrokimia) 5. Data pemantauan harian parameter pH dan debit/TSS untuk jenis industri pertamban

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
				gan B. Melaporkan data palsu.
4.	Ketaatan Terhadap Baku Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak boleh melebihi Debit maksimum (yang mempersyaratkan debit maksimum) 2. Memenuhi 100 % Konsentrasi dalam satu periode penilaian tiap titik penaaatan tiap parameter; 3. Memenuhi 100 % Beban Pencemaran dalam satu periode penilaian tiap titik penaaatan tiap parameter. 4. Untuk data hasil pemantauan KLH memenuhi 100% debit, konsentrasi dan beban. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah data yang memenuhi Debit maksimum dalam satu periode penilaian setiap titik penaaatan untuk setiap parameter 50% $\leq n < 100$ %; 2. Jumlah data yang memenuhi baku mutu Konsentrasi dalam satu periode penilaian setiap titik penaaatan untuk setiap parameter 50% $\leq n < 100$ %. 3. Jumlah data yang memenuhi baku mutu beban pencemaran dalam satu periode penilaian setiap titik penaaatan untuk setiap parameter 50% $\leq n < 100$ % 4. Tidak ada parameter yang melebihi baku mutu lebih dari 500% 5. Untuk data hasil pemantauan KLH tidak memenuhi baku mutu, tetapi tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah data yang memenuhi Debit maksimum dalam satu periode penilaian setiap titik penaaatan untuk setiap parameter < 50%; 2. Jumlah data yang memenuhi baku mutu Konsentrasi dalam satu periode penilaian tiap titik penaaatan tiap parameter < 50% 3. Jumlah data yang memenuhi baku mutu beban pencemaran dalam satu periode penilaian tiap titik penaaatan tiap parameter < 50% 4. Terdapat parameter yang melebihi baku mutu lebih dari 500% baik data swapantau maupun data KLH.

No.	ASPEK	PERINGKAT	
		BIRU	HITAM
5.	Ketaatan Terhadap Izin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai izin pembuangan limbah cair (IPLC) ke badan air / Laut / Land Application; 2. Izin dalam proses akhir (persyaratan izin sudah lengkap) 	<p>PERINGKAT MERAH melebihi 500%.</p> <p>Tidak mempunyai izin pembuangan air limbah (IPLC) ke badan air / Laut / LA ;</p>
6.	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan jasa laboratorium eksternal/ internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur; 2. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan; 3. Membuat saluran air limbah yang kedap air ; 4. Memasang alat pengukur debit (flowmeter); 5. Tidak melakukan pengenceran; 6. Tidak melakukan by pass air limbah; 7. Memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi. 	<p>A. Tidak memenuhi salah satu persyaratan teknis dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan jasa laboratorium eksternal/ internal yang sudah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Gubernur; 2. Memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan; 3. Membuat saluran air limbah yang kedap air ; 4. Memasang alat pengukur debit (flowmeter) ; 5. Tidak melakukan pengenceran. <p>B. Memenuhi seluruh ketentuan</p> <p>1. Tidak memenuhi seluruh ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pengenceran; 3. Melakukan by pass.

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
			yang dipersyaratkan dalam sanksi administrasi;	

C. KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
1.	Ketaatan Terhadap Sumber Emisi	<p>Memantau semua sumber emisi, <u>kecuali</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) : kapasitas < 100 HP (76,5 KVA); beroperasi < 1000 jam/tahun; Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun; Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las Exhaust Laboratorium Fire Assay Khusus Rumah Sakit dan Hotel tidak diwajibkan memantau sumber emisi yg beroperasi < 1000 jam/tahun 	<p>Memantau semua sumber emisi, <u>kecuali</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) : kapasitas < 100 HP (76,5 KVA); beroperasi < 1000 jam/tahun; Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) yang digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan, kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun; Internal Combustion Engine (Genset, Transfer Pump Engine) yang digunakan untuk penggerak derek dan peralatan las Exhaust Laboratorium 	Tidak melakukan pemantauan seluruh sumber emisi

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
			Fire Assay	
2.	Ketaatan Terhadap Parameter	<p>1. Memantau seluruh parameter yang dipersyaratkan :</p> <p>a. Untuk sektor yang mempunyai Baku Mutu Spesifik mengacu kepada Baku Mutu Emisi Spesifik.</p> <p>b. Untuk sektor yang belum mempunyai Baku Mutu Spesifik mengacu kepada baku mutu Lampiran VB Kepmen 13/1995, kecuali Genset mengacu kepada PerMenLH 21 Tahun 2008 Lampiran IVA</p> <p>2. Bagi emisi yang bersumber dari proses pembakaran dengan kapasitas < 25 MW atau satuan lain yang setara yang menggunakan bahan bakar gas, tidak wajib mengukur parameter sulfur dioksida jika kandungan sulfur dalam bahan bakar kurang dari atau sama dengan 0,5% berat dan tidak mengukur</p>	<p>Terdapat parameter yang tidak diukur sesuai persyaratan baku mutu Lampiran VB Kepmen 13/1995 atau Baku Mutu Spesifik</p>	<p>Tidak pernah memantau parameter yang dipersyaratkan sesuai dengan baku mutu</p>

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		parameter total partikulat.		
3.	Ketaatan Terhadap Pelaporan	<p>1. Melaporkan secara periodik kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota:</p> <p>a. Pemantauan CEMS, setiap 3 bulan tersedia data minimal 75% dari seluruh data pemantauan rata-rata harian. (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran)</p> <p>b. Pemantauan Manual, setiap 6 bulan minimal 1 data, kecuali :</p> <p>1. Proses pembakaran dengan kapasitas desain ≤ 570 KW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.</p> <p>2. Proses pembakaran dengan kapasitas desain $570 \text{ KW} < n \leq 3 \text{ MW}$ pemantauan dilakukan paling sedikit 1</p>	<p>1. Pelaporan tidak lengkap sesuai dengan peraturan baik data pemantauan manual maupun CEM</p> <p>2. Cerobong emisi yang bukan sumber utama(tidak masuk dalam BMEU spesifik) dengan kapasitas sama, bahan bakar sama, jumlah cerobong ≥ 5 dilakukan pengujian $< 50\%$ dari jumlah cerobong dan pengujian dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p>	<p>1. Tidak ada data pemantauan manual atau CEMS.</p> <p>2. Melaporkan data pemantauan palsu</p>

No.	ASPEK	PERINGKAT	
		BIRU	HITAM
		<p>(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Proses pembakaran dengan kapasitas desain > 3 MW pemantauan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.</p> <p>4. Pelaporan unit Ketel uap yang beroperasi < 6 bulan pengujian minimal 1 kali dalam 1 tahun.</p> <p>2. Cerobong emisi yang bukan sumber utama (tidak masuk dalam BMEU spesifik) dengan kapasitas sama, bahan bakar sama, dan jumlah cerobong ≥ 5 dilakukan pengujian sebanyak 50% dari jumlah cerobong dan pengujian dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>3. Khusus Rumah Sakit dan Hotel pada periode 2010-2011 boleh melakukan pemantauan sumber emisi 1 kali/setahun</p>	

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
4.	Ketaatan Terhadap Baku Mutu	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi BMEU 100% untuk pemantauan manual; Bagi pemantauan yang wajib CEMS, Data hasil pemantauan dapat dilampaui sampai batas 5% dari data rata-rata harian yang dilaporkan dalam kurun waktu 3 bulan waktu operasi; 	<ol style="list-style-type: none"> Pemantauan manual : Tidak memenuhi baku mutu Pemantauan CEMS : <ol style="list-style-type: none"> data hasil pemantauan melebihi 5% dari data rata-rata harian selama 3 bulan waktu operasi jumlah data rata-rata harian kurang dari 75% (data dianggap valid apabila dalam sehari minimal tersedia 18 jam pengukuran) 	<ol style="list-style-type: none"> Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan manual dan data CEMS tidak memenuhi baku mutu; Melebihi Baku Mutu > 500%
5.	Ketaatan Terhadap Ketentuan Teknis	<ol style="list-style-type: none"> Memasang dan mengoperasikan CEM bagi industri : <ol style="list-style-type: none"> Unit Regenerator Katalis (unit Perengkahan katalitik alir) Unit Pentawaran Sulfur Proses pembakaran dengan kapasitas > 25 MW dan apabila kandungan sulfur > dari 2% untuk 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak menaati semua persyaratan teknis cerobong Tidak memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan 	<ol style="list-style-type: none"> Membuang emisi gas buang tidak melalui cerobong; Tidak melaksanakan sanksi administrasi Tidak memasang CEMS

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		seluruh kapasitas d. Peleburan Baja e. Pulp & Kertas f. Pupuk g. Semen 2. Peralatan CEM beroperasi normal; 3. Menaati semua persyaratan teknis cerobong 4. Semua sumber emisi non fugitive emisi harus dibuang melalui Cerobong 5. Menggunakan jasa laboratorium eksternal yang ditunjuk oleh Gubernur; 6. Memenuhi sanksi administrasi sampai batas waktu yang ditentukan		

D. KRITERIA PENGELOLAAN LIMBAH B3

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
1.	Pendataan Jenis dan Volume Limbah yang dihasilkan : - Identifikasi jenis Limbah B3 - Pencatatan Jenis Limbah B3 yang dihasilkan - Melakukan Pengelolaan Lanjutan (pengelolaan setelah penyimpanan)	Semua terpenuhi	1. Tidak seluruh limbah teridentifikasi 2. Tidak rutin melakukan Pencatatan jenis LB3 yang dihasilkan 3. Tidak seluruh LB3 dilakukan Pengelolaan lanjutan	1. Tidak melakukan identifikasi LB3 2. Tidak melakukan pencatatan jenis LB3 yang dihasilkan 3. Tidak melakukan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan 4. Tidak memiliki manifest yang sesuai dengan limbah B3 yang dikelola

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
	b. Effluent (Pengolahan air limbah B3, Pengolahan air lindi, sumur pantau) 1. Pemenuhan terhadap BMAL 2. Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa	1. Seluruh parameter memenuhi BMAL, dan 2. Mengukur seluruh parameter, dan 3. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku	1. Tidak semua parameter memenuhi BMAL, atau 2. Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan, atau 3. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin	1. Tidak pernah melakukan pengukuran kualitas air limbah 2. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan tidak memenuhi baku mutu 3. Melebihi baku mutu untuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut
	c. Standar Mutu produk atau material limbah B3 yang akan dimanfaatkan Frekuensi pengukuran 1. Parameter yang diukur (contoh kuat tekan, kualitas pelumas bekas yang akan dibakar, dll)	1. Seluruh persyaratan standar mutu memenuhi ketentuan izin, dan 2. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku	Tidak memenuhi salah satu persyaratan standar mutu	Tidak melakukan pengukuran standar mutu sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku.
4.	Open dumping dan Pengelolaan tumpahan dan tanah terkontaminasi limbah B3 1. Rencana Pengelolaan 2. Pengelolaan ceceran 3. Jumlah ceceran	1. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill). 2. Pengelolaan tanah terkontaminasi akibat operasi dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan. 3. Clean up tumpahan (spill) diselesaikan dalam waktu satu bulan. 4. Jumlah/volume tumpahan (spill) tercatat dengan	1. Memiliki rencana pengelolaan penanganan tanah terkontaminasi dan tumpahan (spill). 2. Pengelolaan tanah terkontaminasi hasil clean up tidak sesuai dengan rencana pengelolaan. 3. Clean up tumpahan (spill) diselesaikan lebih dari satu	Tidak melakukan clean up

No.	ASPEK	PIRINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
2.	Perizinan : - Izin pengelolaan Limbah B3 - Masa berlaku izin (kadaluarsa)	1. Memiliki izin PLB3 yang dipersyaratkan dan izin tersebut masih berlaku 2. Telah mengajukan izin PLB3 dan secara teknis telah memenuhi ketentuan (berdasarkan hasil verifikasi tim Proper)	1. Izin telah habis masa berlaku dan tidak mengajukan perpanjangan izin 2. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya.	Tidak memiliki salah satu izin pengelolaan limbah B3.
3.	Pelaksanaan Ketentuan Izin: Pemenuhan terhadap ketentuan teknis dalam izin selain Baku Mutu (kecuali Baku Mutu Lingkungan seperti Emisi, Effluent dan standard mutu)	Memenuhi $\geq 90\%$ dari ketentuan izin. (10% hanya diperuntukkan bagi kesalahan-kesalahan minor misalnya simbol/label, lampu penerangan, APAR (alat pemadam kebakaran) dalam penyimpanan Limbah B3.)	Memenuhi $90\% > x \geq 50\%$ dari ketentuan izin PLB3	Memenuhi $< 50\%$ dari ketentuan izin PLB3
	a. Emisi (Insinerator dan atau bahan bakar pembantu) 1. Pemenuhan terhadap BME 2. Jumlah parameter yang diukur dan dianalisa	1. Seluruh parameter memenuhi BME, dan 2. Mengukur seluruh parameter, dan 3. Frekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izin/peraturan yang berlaku	1. Tidak semua parameter memenuhi BME, atau 2. Tidak mengukur seluruh parameter yang dipersyaratkan, atau 3. Frekuensi pengukuran tidak sesuai dengan izin	1. Tidak pernah melakukan pengukuran emisi 2. Dalam satu periode penilaian semua data pemantauan tidak memenuhi baku mutu 3. Melebihi baku mutu untuk parameter yang sama selama 3 kali berturut-turut

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
		baik.	4. bulan. Jumlah/volume tanah terkontaminasi tidak tercatat dengan baik.	
5.	Jumlah Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan (%)	1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola 100 % dengan pengelolaan lanjutan sesuai dengan ketentuan 2. Seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan	1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola $100% > x \geq 50%$, atau 2. Tidak seluruh jenis limbah B3 dilakukan pengelolaan	1. Jumlah/volume limbah B3 yang dikelola $< 50%$, atau 2. seluruh limbah B3 tidak dilakukan pengelolaan
6.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	1. Pihak ke-3 (pengumpul) yang ditunjuk : a. mempunyai izin yang masih berlaku b. Jenis limbah yang dikumpul sesuai dengan izin yang berlaku c. memiliki kontrak kerjasama yang sah antara pengumpul dengan pihak pemanfaat atau pengolah d. tidak dalam masalah pencemaran lingkungan 2. Pihak ke-3 Jasa Pengangkutan limbah B3 memiliki izin dari Kementerian Perhubungan dan sesuai dengan jenis limbah B3 yang diizinkan. (Izin yang dimaksud juga terkait dengan pemindahan/pengangkutan limbah	1. Pihak ke-3 (pengumpul) yang ditunjuk : a. Izin habis masa berlaku b. Tidak memiliki kontrak kerjasama yang sah dengan pihak pemanfaat atau pengolah c. sedang dalam masalah pencemaran lingkungan 2. Tidak memiliki izin untuk Pengangkutan internal limbah B3 untuk pemindahan limbah B3 yang melintasi sarana publik 3. Dokumen limbah B3 (manifest) yang dimiliki oleh penghasil tidak sesuai dengan ketentuan Kepdal	1. Pihak ke-3 Pengumpul Limbah B3 tidak memiliki izin. 2. Jasa Pengangkutan limbah B3 tidak memiliki izin dari Kementerian Perhubungan

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH 02/1995	HITAM
		B3 internal perusahaan yang melintasi wilayah/sarana publik) 3. Dokumen limbah B3 (manifest) yang dimiliki oleh penghasil sesuai dengan ketentuan Kepdal 02/1995		
7.	Dumping, open burning dan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu: 1. Izin dumping 2. Jumlah/volume LB3 yang di dumping	1. Memiliki izin dengan cara tertentu dari instansi yang berwenang 2. Tidak melakukan kegiatan open burning 3. Telah menghentikan kegiatan open burning dan mengolah limbah tersebut sesuai dengan rencana detail penyelesaian dalam kurun waktu tertentu serta melakukan sesuai dengan rencana tersebut	1. Telah mengajukan izin, namun belum menyelesaikan persyaratan teknis dan ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannya 2. Telah menghentikan kegiatan open burning dan mengolah limbah tersebut namun tidak sesuai dengan rencana detail penyelesaian dalam kurun waktu tertentu	1. Melakukan Dumping tanpa izin 2. Dengan sengaja melakukan kegiatan open burning

E. KRITERIA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Kriteria Proper Aspek Pengendalian kerusakan lingkungan didasarkan pada hasil penilaian semua tahapan/lokasi tambang dengan menggunakan kriteria potensi kerusakan lahan pada kegiatan pertambangan. Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan.

No.	ASPEK	PERINGKAT		
		BIRU	MERAH	HITAM
1.	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Semua tahapan/lokasi tambang atau 100% dengan Nilai Total dari Penilaian Aspek Potensi kerusakan lingkungan adalah lebih besar atau sama dengan 80.	Tidak semua tahapan/lokasi tambang dengan Nilai Total dari Penilaian Aspek Potensi kerusakan lingkungan untuk lebih besar atau sama dengan 80. Lebih dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan Nilai Total lebih kecil 55	Kurang dari 50% dari semua tahapan/lokasi tambang mendapatkan Nilai Total lebih kecil 55

Status aktivitas: Pembersihan Lahan/Pengupasan Tanah Pucuk/Penggalian Tanah
Penutup/Penambangan/Penimbunan/Reklamasi

	Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
			>= Skala 1 : 2.000	10	a. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan) b. Ada peta minimal skala 1: 2000, Peta ini biasanya merupakan peta kerja 1: 5000 di lapangan. Jika diperlukan 1: 2000 bisa dalam bentuk digital. c. Peta menggambarkan: Interval kontur, Pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang) d. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan
ASPEK MANAJEMEN	K1	1. Peta Rencana	< Skala 1 : 2.000	5	a. Peta untuk lokasi yang dinilai (masing-masing lokasi atau peta keseluruhan) b. Ada peta dengan skala diatas 1: 2000. c. Peta menggambarkan: Interval kontur, Pola drainase, dapat digunakan untuk melihat kemajuan tambang) d. Tanggal pengesahan peta sebelum penilaian dilakukan
			tidak tersedia peta	0	Tidak ada peta perencanaan
			Ada	6	a. Ada persetujuan oleh instansi teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT) b. Untuk peta kerja /sequent (1 : 2000), dapat disetujui oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi
		2. Persetujuan	Tidak Ada	0	a. Tidak ada persetujuan oleh instansi

Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
				<p>teknis atau paling tidak Kepala Teknik Tambang (KTT)</p> <p>b. Untuk peta kerja /sequent (1 : 2000), tidak ada persetujuan oleh manager/kepala lapangan yang bertanggungjawab dibidang perencanaan, engineering dan/atau produksi</p>
	3. Kemajuan luasan	sesuai rencana	2	<p>a. realisasi sama atau lebih kecil dari luasan rencana, dilihat dari realisasi Triwulanan.</p> <p>b. Pada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis</p> <p>c. Membandingkan laporan realisasi kemajuan tahapan pertambangan (laporan lapangan, laporan triwulanan) dan prakiraan lapangan dengan rencana dalam dokumen RKTTL</p>
		>luas rencana	0	
	4. Jadwal	sesuai rencana	2	<p>a. Realisasi sesuai jadwal rencana</p> <p>b. Ada kondisi tertentu terjadi perubahan, maka diperlukan persetujuan instansi teknis</p> <p>c. Jadwal pelaksanaan realisasi tahapan pertambangan dibandingkan dengan jadwal rencana pertambangan dalam dokumen RKTTL</p>
		tidak sesuai		<p>a. Realisasi tidak sesuai jadwal rencana</p> <p>b. Tidak ada persetujuan perubahan rencana dari instansi teknis</p>
	Aktifitas	ada aktifitas/kontinu	10	<p>a. Ada aktifitas dilapangan</p> <p>b. Aktifitas termasuk pemompaan di Pit atau perawatan kolam</p>
		tidak ada aktifitas 3 bulan s/d 1 tahun	5	<p>a. Terlihat tidak ada aktifitas dilapangan</p> <p>b. Lamanya ditinggal 3 bulan s/d 1 tahun, dilihat dari data rencana kerja dan realisasi Triwulanan</p> <p>c. Lahan ditinggal > 1 Tahun, tetapi ada persetujuan dari instansi terkait</p>
		tidak ada aktifitas > 1 tahun	0	<p>a. Tidak ada aktifitas lebih dari 1 tahun</p> <p>b. tidak ada persetujuan instansi terkait terhadap lahan tersebut ditinggalkan sementara</p>
K3	Potensi Longsor	Besar	0	<p>a. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang atau overall > 5° dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri)</p> <p>b. Kemiringan atau tinggi Lereng</p>

Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
				<p>dibuat berdasarkan rekomendasi kajian geoteknik namun tidak dimintakan persetujuan Pemerintah</p> <p>c. Ada longsor atau guguran batuan di area tambang, meskipun kemiringan lereng sesuai rekomendasi kajian geoteknik</p> <p>d. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area lebih dari sepertiga bagian lereng; atau</p> <p>c. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan dengan luas zona lebih dari seperempat bagian lereng</p>
		Sedang	5	<p>a. Lebih besar dari sudut kemiringan lereng jenjang/overall sampai dengan 5° dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri)</p> <p>b. Ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng dengan area kurang dari sepertiga bagian lereng</p> <p>c. Ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan dengan luas zona kurang dari seperempat bagian lereng</p>
		Kecil	10	<p>a. Sudut kemiringan lereng jenjang atau overall sama atau lebih kecil dari rekomendasi kajian geoteknik yang disetujui Pemerintah (tercantum dalam FS atau dalam kajian tersendiri)</p> <p>b. Tidak ada retakan pada lereng maupun pada puncak lereng</p> <p>c. Tidak ada gejala pergerakan tanah yang terlihat di lapangan</p>
K4	Upaya penanganan batuan yang berpotensi pencemar	Ada	10	<p>a. Dilakukan analisis geokimia (pengkarakteristikan batuan limbah) untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya). Lampiran : dokumen studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam</p> <p>b. Ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam)</p> <p>c. Ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL</p> <p>d. Ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT</p>

Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
				atau lainnya); dan c. Adanya upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT. f. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai dilapangan, nilai pH ≥ 6
		Tidak	0	a. Tidak ada pengkarakteristikan batuan limbah (Potensi dan tidak potensi membentuk asam). Tidak ada studi pengkajian batuan potensi dan tidak potensi asam b. Tidak ada perlakuan terhadap batuan potensi asam (SOP pemberlakuan batuan potensi asam dan tidak potensi asam) c. Tidak ada sistem pengumpul leachate/seepage/rembesan dari timbunan (AAT) dan melakukan pengolahan AAT di IPAL d. Tidak ada sistem drainase untuk mengalirkan genangan-genangan AAT e. Tidak dilakukan analisis geokimia untuk memastikan ada tidaknya batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (potensi asam atau PAF atau yang lainnya) f. Pengukuran pH air pada genangan-genangan yang dijumpai di lapangan. Nilai pH ≤ 6 g. Tidak ada perencanaan dan pengelolaan terhadap batuan yang berpotensi menimbulkan pencemaran (AAT atau yang lainnya); atau h. Tidak ada upaya pengelolaan terhadap AAT dan upaya pengolahan AAT
K5	1. Upaya pengendalian erosi	Ada	10	a. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya; b. Ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya; c. Kolam sedimen berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen)
		Tidak	0	a. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover cropping,

Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
				<p>gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;</p> <p>b. Tidak ada sarana pengendali erosi berupa drainase, terasiring, guludan, rip rap, drop structure, mulsa, jut net, cover cropping, gabion, kolam sedimen (settling pond, sedimen trap), atau yang lainnya;</p> <p>c. Kolam sedimen tidak berfungsi sebagaimana mestinya (kekeruhan air semakin berkurang pada tiap kompartemen)</p>
	2. Kondisi sarana pengendali erosi	Memadai	8	<p>a. sarana pengendali erosi dalam bentuk drainase memenuhi kriteria teknis untuk dapat menampung semua air limpasan dan terarah ke dalam IPAL/settling pond (Mintakan Peta sistem pengelolaan air limbah)</p> <p>b. Cover Cropping: menutupi lebih besar dari 50%</p> <p>c. Sedimen trap/sedimen pond efektif menangkap sedimen dilihat dari desain fisik lapangan (minta data perawatan sedimen trap/sedimen pond; jumlah sedimen yang dipindahkan)</p> <p>d. Ada perhitungan volume air larian permukaan berdasarkan daerah tangkapan hujan (catchment area)</p> <p>e. Ada peta pengelolaan air larian permukaan (peta water management);</p> <p>f. Drainase dibuat berdasarkan perencanaan dan perhitungan kapasitas air larian permukaan;</p> <p>g. Kolam sedimen dibuat berdasarkan perencanaan dan desain disetujui oleh KTT atau pejabat berwenang di perusahaan; dan</p> <p>h. Kapasitas kolam sedimen sesuai dengan volume air larian permukaan (ada dasar perhitungan) dan air dalam kolam terlihat tergenang/tidak mengalir (aliran hanya terlihat di saluran antar kompartemen)</p>
		Tidak Memadai	0	
	3. Indikasi terjadi erosi	Ada	0	<p>a. Kekeruhan yang tinggi pada aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang), dibuktikan dengan pengukuran Parameter TSS atau turbidity yang sangat tinggi. Ukuran Parameter TSS (TSS + Mg/L) atau turbidity identik dengan</p>

Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
				<p>banyaknya sedimen yang tererosi.</p> <p>b. Ditemukan banyak sedimen yang ada di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan.</p> <p>c. Adanya galur (bekas aliran air dilereng), lebar.....cm kedalaman.... cm</p> <p>d. Ukuran jumlah banyaknya sedimen (.....ton/ha)</p> <p>e. Ada erosi pada lereng mempunyai dimensi lebar > 20 cm dan dalam > 5 cm</p> <p>f. Sarana pengendali erosi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan bertambahnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir</p>
		Tidak	7	<p>a. aliran drainase dari kegiatan pertambangan (lereng-lereng aktifitas tambang) cukup jernih, dibuktikan dengan pengukuran Parameter TSS atau turbidity yang rendah.</p> <p>b. Tidak ditemukan jumlah sedimen yang banyak di sedimen trap/ kolam pengendap pertama. Dilihat dari data jumlah sedimen hasil pengerukan/perawatan kolam pengendap oleh perusahaan.</p> <p>c. Ukuran jumlah banyaknya sedimen (.....ton/ha)</p> <p>d. Tidak terdapat alur-alur erosi pada lereng timbunan</p> <p>e. Ada erosi pada lereng, namun mempunyai dimensi kecil (lebar < 20 cm dan dalam < 5 cm)</p> <p>f. Sarana pengendali erosi berfungsi sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan berkurangnya kekeruhan air larian permukaan semakin ke arah hilir</p>
	4. Sistem drainase	Menuju ke sistem pengendali kualitas air	10	<p>a. Terdapat sistem drainase di seluruh areal pertambangan</p> <p>b. Drainase dapat memenuhi mengalirkan semua air limpasan ke kolam-kolam pengendap/settling pond.</p> <p>c. Tidak ditemukan aliran liar keluar ke lingkungan tanpa melalui kolam pengendap/settling pond</p> <p>d. Ada peta manajemen pengelolaan air tambang</p>

Kriteria	Parameter	Standar Evaluasi	Nilai	Ket
				<p>c. Pada seluruh area kegiatan diluar pit ada sarana drainase</p> <p>f. Drainase terhubung dan mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond);</p> <p>g. Drainase dibuat sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air)</p> <p>h. Tidak mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami</p>
		Langsung menuju badan perairan	0	<p>a. Ditemukan tidak ada sistem drainase pada lokasi pertambangan</p> <p>b. Terdapat aliran air run-off keluar ke lingkungan/badan air tanpa melalui kolam pengendap/settling pond</p> <p>c. Ada area kegiatan di luar Pit tanpa sarana drainase</p> <p>d. Ada drainase yang tidak mengarah ke kolam sedimen (sedimen pond, sedimen trap, atau settling pond);</p> <p>e. Drainase dibuat tidak sesuai dengan kapasitas air larian permukaan (dimensi semakin besar ke arah hilir, tidak ada indikasi luapan air)</p> <p>f. Mencampur aliran air permukaan dari tambang dengan aliran alami</p>
K6	5. Ada potensi kebencanaan?	Ya	0	<p>a. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat tidak dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat</p> <p>b. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat lebih dekat dari jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan Dokumen AMDAL</p>
		Tidak	15	<p>a. Lokasi kegiatan pertambangan yang berbatasan dengan masyarakat dilengkapi dengan fasilitas tanggap darurat</p> <p>b. Apabila jarak batas terluar dengan masyarakat memenuhi ketentuan jarak yang direkomendasikan di dalam kajian FS dan Dokumen AMDAL</p>
NILAI TOTAL			100	

KETERANGAN :

- Nilai Total yang didapat untuk masing-masing tahapan memberikan kesimpulan dan status pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian kerusakan lahan pertambangan.

- Kriteria dibedakan menjadi :
 - Tidak Potensi Rusak ($X \geq 80$)
 - Potensi Rusak Ringan ($55 \leq X < 80$)
 - Potensi Rusak Berat ($X < 55$)

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Inar Ichsana Ishak

Lampiran II
Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 05 Tahun 2011
Tanggal : 11 Oktober 2011

KRITERIA PENILAIAN
PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)
HIJAU DAN EMAS

A. KRITERIA PENILAIAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

1. Ketentuan Umum

Dalam penilaian PROPER ini, suatu unit bisnis dianggap memiliki Sistem Manajemen Lingkungan (SML) jika:

- a. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem tersebut diidentifikasi berdasarkan dampak dari kegiatan, produk atau jasa yang dihasilkan oleh unit bisnis yang bersangkutan. Jika unit bisnis tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu induk korporasi, maka harus dibuktikan bahwa aspek-aspek lingkungan yang dikelola memang spesifik untuk unit bisnis yang bersangkutan.
- b. Aspek-aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan mencakup seluruh kegiatan utama dalam unit bisnis yang bersangkutan. Jika cakupan sistem manajemen lingkungan hanya sebagian kecil atau bukan kegiatan utama, maka unit bisnis tersebut tidak dianggap memiliki sistem manajemen lingkungan.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Lingkungan	a. Kebijakan lingkungan mempertimbangkan karakteristik, skala dan dampak dari kegiatan.	0-----1
	b. Kebijakan lingkungan mencakup komitmen untuk perbaikan terus menerus dan pencegahan pencemaran (<i>pollution prevention</i>).	0-----1
	c. Kebijakan Lingkungan mencakup komitmen untuk taat terhadap peraturan lingkungan	0-----1
	d. Kebijakan lingkungan tercermin dalam penetapan tujuan dan sasaran lingkungan.	0-----1

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	e. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan ditandatangani oleh pucuk pimpinan, dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja pada atau atas nama organisasi dan tersedia bagi masyarakat luas.	0-----1
2. Perencanaan		
	a. Aspek Lingkungan	
	1) Dapat menunjukkan bahwa aspek lingkungan telah dilakukan secara terstruktur dengan mempertimbangkan dampak dari kegiatan, produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.	0-----1
	2) Dapat menyebutkan aspek lingkungan utama yang sedang dikelola minimal selama 2 tahun terakhir.	0-----1
	3) Dapat menunjukkan bahwa proses penetapan aspek lingkungan didokumentasikan dandipelihara kemutakhirannya.	0-----2
	b. Pemenuhan Peraturan	
	1) Perusahaan telah menggunakan peraturan terbaru untuk mengukur ketaatannya dalam:	
	a) Pengendalian pencemaran air	0-----1
	b) Pengendalian pencemaran udara	0-----1
	c) Pengelolaan limbah B3	0-----1
	2) Perusahaan telah memasukkan hasil temuan Proper sebagai salah satu penetapan aspek lingkungan yang perlu dikelola.	0-----1
	c. Tujuan dan sasaran	
	1) Perusahaan telah menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan secara kualitatif terhadap aspek-aspek	

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	<p>lingkungan utama sebagaimana tercantum dalam angka a. 2).</p> <p>2) Memiliki rencana strategis (jangka panjang) untuk mencapai tujuan dan sasaran.</p> <p>3) Dapat menunjukkan bukti bahwa tujuan dan sasaran, salah satunya, ditetapkan berdasarkan masukan dari masyarakat atau dari pemerintah atau dari konsumen perusahaan.</p> <p>4) Tujuan dan sasaran yang ditetapkan mencerminkan penerapan prinsip pencegahan pencemaran/kerusakan lingkungan (<i>pollution prevention</i>).</p>	<p>0----1</p> <p>0----1</p> <p>0----1</p> <p>0----1</p>
	<p>d. Program Manajemen Lingkungan</p> <p>Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup:</p> <p>1) Penunjukkan penanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (baik secara fungsional maupun struktural organisasi).</p> <p>2) Metode dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.</p> <p>3) Dapat menunjukkan adanya EMS Manual yang mengcover seluruh dampak kegiatan.</p>	<p>0----1</p> <p>0----1</p> <p>0----2</p>
3. Implementasi	<p>a. Struktur dan tanggung jawab</p> <p>a. Memiliki struktur dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan EMS.</p> <p>b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan EMS:</p> <p>a) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan</p>	<p>0----1</p>

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	dengan pelaksanaan EMS).	0-----1
	b) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan EMS selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----1
	c. Bagian manajemen yang menangani EMS melapor langsung ke puncak pimpinan.	0-----1
	b. Pelatihan, Kesadaran dan Kompetensi	
	a. Dapat menunjukkan daftar kebutuhan training yang berkaitan dengan lingkungan minimal selama 2 tahun terakhir untuk seluruh departemen.	0-----1
	b. Dapat menunjukkan nama personel, jenis pelatihan dan asal departemen yang telah memperoleh pelatihan lingkungan minimal selama 2 tahun terakhir.	0-----1
	c. Dapat menunjukkan prosedur untuk meningkatkan kesadaran lingkungan karyawan dan atau kontraktor.	0-----1
	d. Dapat menunjukkan bukti bahwa karyawan atau kontraktor yang melaksanakan pengelolaan lingkungan di bawah adalah kompeten, dengan menunjukkan bukti latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang relevan.	
	a) Pengendalian pencemaran air	0-----2
	b) Pengendalian Pencemaran Udara	0-----2
	c) Pengelolaan Limbah B3	0-----2
	d) Sistem Manajemen Lingkungan	0-----2
	c. Komunikasi	

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	<p>a. Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan PROPER telah dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk di tindak lanjuti.</p> <p>b. Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan PROPER telah dikomunikasikan kepada pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut.</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p>
	<p>d. Dokumentasi EMS Dapat menunjukkan bahwa temuan dan tindak lanjut PROPER selama minimal 2 tahun berturut-turut terdokumentasi dengan baik dan dapat dilacak dengan mudah.</p>	<p>0-----2</p>
	<p>e. Kontrol Dokumen Dapat menunjukkan bukti bahwa laporan pengelolaan lingkungan di bawah telah dilaporkan kepada instansi yang relevan dan disetujui oleh manajemen yang mempunyai wewenang, minimal selama 2 tahun berturut-turut:</p> <p>a. Laporan Pemantauan Air Limbah</p> <p>b. Laporan Pemantauan Emisi</p> <p>c. Laporan Pengelolaan Limbah B3</p> <p>d. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL atau UKL UPL</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p>
	<p>f. Kontrol Operasional Dapat menunjukkan bukti bahwa perusahaan telah mempunyai prosedur untuk “memaksa” kontraktor melaksanakan pengelolaan aspek lingkungan sesuai dengan EMS yang dimiliki perusahaan.</p>	<p>0-----2</p>
	<p>g. Sistem Tanggap Darurat a. Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengembangkan</p>	

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	<p>sistem tanggap darurat untuk mengatasinya.</p> <p>b. Dapat menunjukkan bahwa sistem tanggap darurat telah di-review secara reguler dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.</p> <p>c. Dapat menunjukkan catatan terjadinya kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun terakhir.</p> <p>d. Dapat menunjukkan bahwa kejadian kecelakaan atau kondisi darurat selama dua tahun terakhir mengalami penurunan.</p>	<p>0-----2</p> <p>0-----2</p> <p>0-----2</p> <p>0-----2</p>
<p>4. <i>Checking and Corrective Action</i></p>	<p>a. Pemantauan dan Pengukuran</p> <p>a. Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam EMS.</p> <p>b. Dapat menunjukkan metodologi atau prosedur untuk memantau atau mengukur ketaatan terhadap peraturan:</p> <p>a) Pemantauan Air Limbah</p> <p>b) Laporan Pemantauan Emisi</p> <p>c) Laporan Pengelolaan Limbah B3</p> <p>d) Laporan Pemantauan Lingkungan sesuai dengan RKL/RPL atau UKL-UPL</p> <p>c. Pemantauan Air Limbah dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk Gubernur.</p> <p>b. Ketidaksesuaian, Upaya perbaikan dan pencegahan</p> <p>a. Dapat menunjukkan bukti bahwa hasil pemantauan dievaluasi secara reguler dan jika ditemukan ketidaksesuaian ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan.</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p>

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	b. Dapat menunjukkan bukti bahwa temuan PROPER telah ditindaklanjuti secara paripurna.	0-----4
	c. Catatan a. Dapat menunjukkan bahwa pendokumentasian hasil pemantauan lingkungan telah dilakukan dengan baik	0-----1
	d. Audit EMS a. Dapat menunjukkan bukti bahwa Audit Internal dilaksanakan secara reguler dengan menunjukkan waktu, pelaksana dan ringkasan hasil audit yang telah dilaksanakan minimal 1 tahun terakhir. b. Dapat menunjukkan bukti bahwa Audit eksternal telah dilakukan sesuai dengan jadwal dan ringkasan temuan hasil audit.	0-----3 0-----4
5. <i>Review</i> Oleh Manajemer	5. Dapat menunjukkan bukti bahwa pimpinan puncak telah melakukan <i>review</i> pelaksanaan EMS untuk memastikan keberlanjutan <i>suitability, adequacy dan effectiveness</i>	0-----4
6. Rentang Pengaruh	A. Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan. B. Aspek lingkungan yang dikelola dalam sistem manajemen lingkungan hanya dalam lingkup perusahaan memiliki aspek penting dalam sistem manajemen lingkungan telah mencakup pengaturan oleh <i>supplier</i> (input) dan/atau konsumen (output).	1 7
7. Sertifikasi	A. Sertifikasi dilakukan oleh: 1. pihak ketiga independen;	15

ASPEK PENILAIAN	DESKRIPSI KRITERIA	NILAI
	2. sertifikasi oleh group perusahaan induk;	10
	3. masih dalam proses sertifikasi;	5
	4. belum tersertifikasi	0

B. KRITERIA PENILAIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Efisiensi Energi

1. Ketentuan Umum

Kegiatan efisiensi energi yang dinilai dalam kriteria penilaian PROPER ini adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian energi melalui kegiatan-kegiatan Peningkatan Efisiensi, Retrofit (penggantian/perbaikan) peralatan yang ramah lingkungan, Efisiensi di Bangunan, Efisiensi dalam Sistem Transportasi.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Energi	1. Memiliki kebijakan tertulis tentang efisiensi energi	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Memiliki manager energi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan management energi.	0-----2
	b. Memiliki tim yang bertugas melakukan manajemen energi	0-----1
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis efisiensi energi (bersifat jangka panjang) dengan menetapkan tujuan dan sasaran efisiensi energi yang relevan dengan kebijakan lingkungan	0-----2
	b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup : 1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi	0-----3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.</p> <p>2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.</p>	0-----5
4. Audit Energy	<p>a. Telah melaksanakan audit energi, dengan menunjukkan adanya laporan hasil audit yang dilakukan paling lama 3 tahun terakhir.</p> <p>b. Dapat menunjukkan Laporan Audit Energi, yang di dalamnya terdapat informasi tentang :</p> <p>1) Tujuan melakukan audit</p> <p>2) Deskripsi fasilitas yang diaudit</p> <p>3) Deskripsi status energi saat ini.</p> <p>4) Potensi efisiensi energi yang dapat dilakukan.</p> <p>5) Rencana Kerja Energi efisiensi.</p>	<p>0-----2</p> <p>0----1</p> <p>0----1</p> <p>0----1</p> <p>0----3</p> <p>0----2</p>
5. Pelatihan/ kompetensi	<p>Di dalam tim management energi terdapat staf yang memiliki kualifikasi:</p> <p>a. auditor energy</p> <p>b. Training di bidang auditor energi</p> <p>c. Back ground pendidikan yang berkaitan dengan auditor energi</p>	<p>0---5</p> <p>0---3</p> <p>0---1</p>
6. Pelaporan	<p>a. Data Efisiensi Energi</p> <p>1) Menyampaikan data efisiensi energy minimal 3 tahun terakhir.</p> <p>2) Data efisiensi energy dilengkapi dengan bukti perhitungan atau pengukuran yang dapat menunjukkan telah dicapai.</p> <p>3) Data efisiensi telah dinormalisasi dengan data produksi.</p>	<p>0----1</p> <p>0----2</p> <p>0----3</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
7. <i>Benchmarking</i>	<p>Dapat menunjukkan bukti yang valid dan relevan yang menunjukkan:</p> <p>a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, tingkat pemanfaatan energi pada level nasional, Asia dan Dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i>:</p> <p>1) Dunia</p> <p>a) Masuk kedalam 10 Besar.</p> <p>b) Berada di rata-rata</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata.</p> <p>2) Asia</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar</p> <p>b) Berada di rata-rata</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata</p> <p>3) Nasional</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar.</p> <p>b) Berada di rata-rata</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata</p> <p>b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara :</p> <p>1) Internal</p> <p>2) Eksternal</p>	<p>20</p> <p>15</p> <p>7</p> <p>12</p> <p>8</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>5</p> <p>10</p>
8. Implementasi Program	<p>a. Keberhasilan efisiensi energi:</p> <p>1) Hasil efisiensi energi masuk dalam 25 % terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing.</p> <p>2) Hasil efisiensi energi berada dalam interval 25 – 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.</p> <p>3) Hasil efisiensi energi berada di bawah percentile 25 % dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.</p> <p>b. Memperoleh penghargaan dalam bidang efisiensi energi minimal pada tingkat nasional.</p> <p>c. Menunjukkan bahwa kegiatan efisiensi energi berkontribusi</p>	<p>15</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>5</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.	10

a. Kriteria Pengurangan Dan Pemanfaatan Limbah B3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan LB3	Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan limbah B3	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan limbah B3 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan limbah B3). 2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan limbah B3 selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----2 0-----2
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah melakukan inventarisasi Limbah B3 selama minimal 2 tahun berturut turut. b. Perusahaan telah memiliki program pemanfaatan limbah B3 dengan cara, jadwal waktu dan indicator untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2 0-----2
4. Pelatihan/kompetensi	Personil yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan kegiatan pemanfaatan limbah paling lama dalam 3 tahun terakhir.	0-----2
5. Pelaporan	a. Menyampaikan data neraca limbah B3 selama minimal 3 tahun terakhir. b. Menyampaikan data keberhasilan pemanfaatan limbah B3 minimal 3 tahun terakhir. c. Data pemanfaatan limbah B3 telah	0-----4 0-----4

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.	0-----5
6. Benchmarking	<p>a. Telah dilakukan benchmarking dengan industri sejenis, dalam pemanfaatan limbah B3. Peringkat Perusahaan dalam Benchmarking:</p> <p>1) Dunia</p> <p>a) Masuk kedalam 10 Besar 20</p> <p>b) Berada di rata-rata 15</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata. 7</p> <p>2) Asia</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar 12</p> <p>b) Berada di rata-rata 8</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 5</p> <p>3) Nasional</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar 5</p> <p>b) Berada di rata-rata 3</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 1</p> <p>b. Benchmarking dilakukan secara:</p> <p>1) Internal 5</p> <p>2) Eksternal 10</p>	
7. Implementasi Program	a. Melakukan pengurangan jumlah salah satu LB3 dominan dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya	
	1) $x < 2\%$	0
	2) $2 \leq x < 5\%$	5
	3) $5 \leq x < 10\%$	10
	4) $x \geq 10\%$	15
	b. Melakukan pengurangan jumlah LB3 non dominan dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya	
	1) $x < 2\%$	0
	2) $2 \leq x < 5\%$	4
	3) $5 \leq x < 10\%$	6
	4) $x \geq 10\%$	10
	c. Melakukan kegiatan pemanfaatan salah satu limbah B3 dominan dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi limbah 1 tahun	
	1) $x < 5\%$	0
	2) $5 \leq x < 25\%$	4

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	3) $25 \leq x < 50\%$	6
	4) $x \geq 50\%$	10
	d. Melakukan kegiatan pemanfaatan salah satu limbah B3 non dominan dari jumlah yang dihasilkan di lokasi atau tempat lain akumulasi 1 tahun	
	1) $x < 5\%$	0
	2) $5 \leq x < 25\%$	4
	3) $25 \leq x < 50\%$	6
	4) $x \geq 50\%$	10

b. Kriteria 3R (*Reuse, Reduse, Recycle*) Limbah Padat Non B3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Pengelolaan Limbah Padat Non B3	a. Memiliki kebijakan tertulis tentang pemanfaatan sampah.	0-----2
b. Struktur dan Tanggung jawab	a. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pemanfaatan sampah 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pemanfaatan sampah).	0-----2
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pemanfaatan sampah selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----2
c. Perencanaan	a. Perusahaan telah melakukan inventarisasi Sampah selama minimal 2 tahun berturut turut.	0-----2
	b. Perusahaan telah memiliki program pemanfaatan sampah dengan cara, jadwal waktu dan indicator untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2
d. Pelatihan/ kompetensi	a. Personil yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah telah memperoleh pelatihan yang relevan dengan kegiatan pemanfaatan limbah paling lama dalam 3 tahun terakhir.	0-----4

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
e. Pelaporan	a. Menyampaikan data neraca sampah selama minimal 2 tahun terakhir.	0-----4
	b. Menyampaikan data keberhasilan pemanfaatan sampah minimal 3 tahun terakhir.	0-----4
	c. Data pemanfaatan sampah telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.	0-----5
6. Benchmarking	a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, dalam pemanfaatan sampah. Peringkat Perusahaan dalam Benchmarking:	
	1) Dunia	
	a) Masuk kedalam 10 Besar.	20
	b) Berada di rata-rata	15
	c) Berada di bawah rata-rata.	7
	2) Asia	
	a) Masuk kedalam 5 Besar.	12
	b) Berada di rata-rata	8
	c) Berada di bawah rata-rata	5
	3) Nasional	
	a) Masuk kedalam 5 Besar.	5
b) Berada di rata-rata	3	
c) Berada di bawah rata-rata	1	
b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara :		
1) Internal	5	
2) Eksternal	10	
7. Implementasi Program	a. Melakukan pengurangan sampah dari jumlah yang dihasilkan. Basis waktu perhitungan dari tahun sebelumnya	
	1) $x < 2\%$	0
	2) $2 \leq x < 5\%$	5
	3) $5 \leq x < 10\%$	10
	4) $x \geq 10\%$	15
	b. Melakukan kegiatan pemanfaatan sampah	
	1) $x < 5\%$	0
	2) $5 \leq x < 25\%$	4
	3) $25 \leq x < 50\%$	6
	4) $x \geq 50\%$	10
	c. Kegiatan Pemanfaatan sampah berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pemberdayaan masyarakat	10

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	d. Memiliki dan mengimplementasikan kebijakan <i>Extended Producer Responsible</i> untuk pengelolaan sampah dari hasil kegiatan yang dihasilkannya.	13

c. Kriteria Pengurangan Pencemar Udara

1. Ketentuan Umum

- a) Pengurangan pencemaran udara yang termasuk dalam lingkup penilaian PROPER ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi emisi bahan pencemaran udara ke lingkungan dan upaya tersebut tidak menyebabkan pencemaran ke media lain secara signifikan.
- b) Pencemaran udara yang dimaksud dalam angka 1 adalah parameter pencemaran udara konvensional yaitu Sulfur Dioksida, Partikulat, Hidrokarbon, Hidrogen Sulfida dan parameter Gas Rumah Kaca yaitu Karbon Dioksida, Methan, Nitrogen Oksida dan Flourinated Gases (bahan perusak Ozone).

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Pengurangan Pencemar Udara	Memiliki kebijakan tertulis tentang pengurangan pencemaran udara	
	<ol style="list-style-type: none"> a. Bahan pencemar udara konvensional. b. Gas Rumah Kaca 	0-----1 0-----1
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Memiliki tim dengan kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara.	0-----1
	b. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pengurangan pencemar udara : <ol style="list-style-type: none"> 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan pengurangan pencemar udara). 	0-----1

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----1
3. Perencanaan	<p>a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk pengurangan pencemar udara dengan menetapkan tujuan dan sasaran pengurangan pencemar udara yang relevan dengan kebijakan lingkungan.</p> <p>b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup :</p> <p>1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.</p> <p>2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p>
4. Inventarisasi Emisi	<p>a. Telah memiliki sistem Inventarisasi Emisi yang mencakup antara lain :</p> <p>1) identifikasi sumber emisi dan proses yang menyebabkan terjadinya emisi, termasuk nama atau kode yang digunakan untuk identitas sumber emisi, titik koordinat dan parameter emisi utama yang dihasilkan dari sumber emisi:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional.</p> <p>b) Gas Rumah Kaca</p> <p>2) Deskripsi metode yang digunakan untuk menghitung beban emisi:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional.</p> <p>b) Gas Rumah Kaca.</p>	<p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p> <p>0-----1</p>

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	<p>3) Pencatatan dan uraian data aktifitas, faktor emisi, faktor oksidasi dan konversi dari masing-masing sumber emisi yang dihitung beban emisinya:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional. 0-----1</p> <p>b) Gas Rumah Kaca 0-----1</p> <p>4) Pendokumentasian bukti-bukti yang dapat menunjukkan kebenaran perhitungan data aktifitas yang digunakan sebagai pendukung untuk perhitungan beban emisi:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional. 0-----1</p> <p>b) Gas Rumah Kaca 0-----1</p> <p>5) Pendiskripsian pendekatan yang digunakan untuk mengambil contoh atau analisa untuk menentukan nilai kalori bersih (<i>net calorific value</i>), kandungan karbon (<i>carbon content</i>), faktor emisi (<i>emission factors</i>), faktor oksidasi, dan konversi (<i>oxidation and conversion factor</i>) untuk masing masing sumber emisi:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional. 0-----1</p> <p>b) Gas Rumah Kaca 0-----1</p> <p>6) Penghitungan beban emisi dari seluruh sumber emisi yang berada dalam area kewenangan kegiatannya:</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional. 0-----1</p> <p>b) Gas Rumah Kaca 0-----1</p>	
5. Pelatihan/ kompetensi	Di dalam tim pengelolaan emisi terdapat staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan inventarisasi emisi berdasarkan training , back ground pendidikan	0-----1

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	yang relevan.	
6. Pelaporan	<p>a. Data Pengurangan Pencemar Udara</p> <p>1) Menyampaikan data pengurangan pencemar udara minimal 3 tahun terakhir.</p> <p>a) Bahan pencemar udara konvensional. 0-----2</p> <p>b) Gas Rumah Kaca 0-----2</p> <p>c) Data telah di normalisasi ke dalam data intensitas emisi (beban emisi per satuan produk atau bahan baku yang digunakan- dengan satuan yang lazim untuk masing- masing sektor industry) 0-----2</p> <p>b. Inventarisasi Emisi telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut maksimal dalam 3 tahun terakhir. 0-----3</p>	
7. Benchmarking	<p>a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, tingkat pemanfaatan energy pada level nasional, Asia dan Dunia/global. Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i>:</p> <p>1) Dunia</p> <p>a) Masuk kedalam 10 Besar. 20</p> <p>b) Berada di rata-rata 15</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata. 7</p> <p>2) Asia</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 12</p> <p>b) Berada di rata-rata 8</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 5</p> <p>3) Nasional</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 5</p> <p>b) Berada di rata-rata 3</p>	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	c) Berada di bawah rata-rata	1
	b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara:	
	1) Internal	5
	2) Eksternal	10
8. Implementasi Program	a. Keberhasilan Pengurangan Pencemar Udara:	
	1) Hasil pengurangan pencemar udara masuk dalam 25 % terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing.	
	a) Bahan pencemar udara konvensional.	10
	b) Gas Rumah Kaca	10
	2) Hasil pencemar udaraberada dalam interval 25 - 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.	
	a) Bahan pencemar udara konvensional.	5
	b) Gas Rumah Kaca	5
	3) Hasil pencemar udaraberada di bawah percentile 25 % dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing.	
	a) Bahan pencemar udara konvensional.	1
	b) Gas Rumah Kaca	1
	b. Telah mengikuti Project CDM atau perdagangan karbon:	
	1) Dalam tahap sudah disetujui oleh DNA dengan menunjukkan bukti persetujuan dari DNA.	5
	2) Dalam Proses Persetujuan <i>Executive Board</i> CDM dengan menunjukkan bukti-bukti yang relevan.	10
	3) Telah Memperoleh Kredit Karbon setelah disetujui oleh <i>Executive Board</i> , dengan menunjukkan bukti persetujuan EB dan kredit	15

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	karbon yang telah diperoleh.	
	c. Memperoleh penghargaan minimal pada tingkat nasional berkaitan dengan penurunan emisi udara.	5
	d. Program penurunan emisi berkontribusi secara signifikan terhadap program pemberdayaan masyarakat.	10
	e. Sudah melakukan pemantauan emisi kendaraan bermotor operasional > 90% dan semua memenuhi baku mutu	10
	f. Menggunakan bahan bakar dapat diperbaharui (<i>renewable</i>) untuk kegiatan utama: 1) $\geq 20\%$ bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar dapat diperbaharui	15
	2) 10-20% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar diperbaharui	10
	3) 2.5-10% bahan bakar yang digunakan berasal dari bahan bakar diperbaharui	5
	g. Pemakaian bahan perusak ozon:	
	1) Tidak menggunakan bahan perusak ozon	10
	2) Memiliki program pengurangan pemakaian bahan perusak ozon	3
	h. >50% bahan bakar yang digunakan untuk kegiatan utama menggunakan bahan bakar gas	5

KRITERIA KONSERVASI AIR

1. Ketentuan Umum

Penilaian konservasi air dalam Peringkat Hijau dan Emas ini meliputi aspek reklamasi air, daur ulang, pemanfaatan kembali dan peningkatan kinerja sistem penyediaan air.

Reklamasi Air adalah pengolahan atau pemrosesan air limbah untuk dapat digunakan kembali sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memenuhi kriteria kualitas air sesuai peraturan yang berlaku.

Daur ulang air adalah pemanfaatan air limbah yang telah diolah dan dikembalikan ke dalam proses produksi.

Pemanfaatan air adalah penggunaan air limbah yang telah diolah untuk kegiatan yang lain seperti irigasi dan air pendingin, dengan catatan kualitas air telah memenuhi baku mutu jika pemanfaatan diaplikasikan ke lingkungan.

Peningkatan kinerja sistem penyediaan air dilakukan dengan mencegah terjadinya kehilangan air akibat kebocoran, atau perbaikan sistem sehingga jumlah air yang hilang mengalami penurunan.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Konservasi Air	Memiliki kebijakan tertulis tentang konservasi air	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	3. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan konservasi air:	
	1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan konservasi air).	0-----2
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengurangan pencemar udara selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----2
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk pengurangan pencemar udara dengan menetapkan tujuan dan sasaran konservasi air yang relevan dengan kebijakan lingkungan.	0-----2
	b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup :	
	1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----2
	2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2
4. Pelatihan/kom	a. Di dalam tim konservasi air terdapat	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
petensi	<p>staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengelolaan air</p> <p>b. Personel pengelolaan air Memiliki Sertifikasi EPCM</p>	<p>0-----2</p> <p>0-----7</p>
5. Pelaporan	<p>a. Data konservasi air</p> <p>1) Menyampaikan data keberhasilan konservasi air minimal 3 tahun terakhir.</p> <p>2) Data telah di normalisasi ke dalam data intensitas pemakaian air (jumlah air per satuan produk atau bahan baku yang digunakan – dengan satuan yang lazim untuk masing-masing sektor industry)</p> <p>3) Data konservasi air telah diverifikasi oleh pihak eksternal yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.</p>	<p>0-----4</p> <p>0-----5</p> <p>0-----10</p>
6. Benchmarking	<p>a. Telah dilakukan <i>benchmarking</i> dengan industri sejenis, dalam bidang konservasi air pada level nasional, Asia dan Dunia/global.</p> <p>Peringkat Perusahaan dalam <i>Benchmarking</i>:</p> <p>1) Dunia</p> <p>a) Masuk kedalam 10 Besar. 20</p> <p>b) Berada di rata-rata 15</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata. 7</p> <p>2) Asia</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 12</p> <p>b) Berada di rata-rata 8</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 5</p> <p>3) Nasional</p> <p>a) Masuk kedalam 5 Besar. 5</p> <p>b) Berada di rata-rata 3</p> <p>c) Berada di bawah rata-rata 1</p> <p>b. <i>Benchmarking</i> dilakukan secara :</p> <p>1) Internal 5</p> <p>2) Eksternal 10</p>	
7. Implementasi Program	<p>a. Keberhasilan Konservasi Air:</p> <p>1) Kinerja termasuk dalam 25 % terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing.</p> <p>2) Kinerja termasuk dalam interval 25 – 75 % percentile dari seluruh</p>	15

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	kandidat hijau di sector masing-masing.	8
	3) Kinerja termasuk dibawah interval 25 percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing	0
	b. Memperoleh penghargaan minimal dalam level nasional berkaitan dengan upaya konservasi pemakaian air.	5
	c. Program konservasi air berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	10

a. Kriteria Penilaian Perlindungan Keanekaragaman Hayati

1. Ketentuan Umum

Penilaian perlindungan keanekaragaman hayati dalam Peringkat Hijau dan Emas ini meliputi:

- a) Konservasi insitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies, *variabilitas genetic* dan habitat dalam ekosistem lainnya. Pendekatan insitu meliputi pengelolaan kawasan lindung seperti: cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, hutan lindung, sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan mangrove, terumbu karang, kawasan plasma nuftah dan kawasan bergambut, termasuk pengelolaan satwa liar dan strategi perlindungan sumberdaya di luar kawasan lindung.
- b) Konservasi Eksitu, meliputi metode dan alat untuk melindungi spesies tanaman, satwa liar dan organism mikro serta varietas genetic di luar habitat/ekosistem aslinya. Kegiatan yang umum dilakukan antara lain penangkaran, penyimpanan atau pengklonan karena alasan: (1) habitat mengalami kerusakan akibat konversi; (2) materi tersebut dapat digunakan untuk penelitian, percobaan, pengembangan produk baru atau pendidikan lingkungan. Dalam metode tersebut termasuk pembangunan kebun raya, koreksi mikrobiologi, museum, bank bibit, koleksi kultur jaringan dan kebun binatang.
- c) Restorasi dan Rehabilitasi, meliputi metode, baik insitu maupun eksitu, untuk memulihkan *spesies, varietas genetic*, komunitas, populasi, habitat dan proses-proses ekologis. Restorasi ekologis biasanya melibatkan upaya rekonstruksi ekosistem alami atau semi alami di daerah-daerah yang mengalami degradasi, termasuk reintroduksi species asli, sedangkan rehabilitasi melibatkan upaya untuk memperbaiki proses-proses ekosistem, misalnya daerah aliran sungai, tetapi tidak diikuti dengan pemulihan ekosistem dan keberadaan spesies asli.

2. Aspek Penilaian

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Memiliki kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Memiliki unit yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati:	
	1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan perlindungan keanekaragaman hayati).	0-----2
	2) Dapat menunjukkan ketersediaan dana untuk pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati selama minimal 2 tahun berturut-turut.	0-----2
	3) Memiliki kerjasama dengan lembaga/organisasi yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati	0-----3
3. Perencanaan	a. Perusahaan telah memiliki rencana strategis untuk perlindungan keanekaragaman hayati.	0-----4
	b. Telah menetapkan program yang jelas untuk mencapai tujuan dan sasaran lingkungan mencakup :	
	1) Pemberian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkatan yang sesuai dalam organisasi tersebut.	0-----2
	2) Cara dan jadwal waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.	0-----2
4. Pelaporan	a. Memiliki sistem informasi yang dapat mengumpulkan dan mengevaluasi status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola	0-----10
	b. Memiliki data tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola minimal selama 2 tahun terakhir	0-----10

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	c. Memiliki publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang relevan tentang status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati dan sumber daya biologis yang dikelola minimal diterbitkan 2 tahun terakhir	0-----20
5. Implementasi Program	a. Keberhasilan perlindungan keanekaragaman hayati: 1) Kinerja termasuk dalam 25 % terbaik dari seluruh kandidat hijau di Sektor masing-masing. 2) Kinerja termasuk dalam interval 25 - 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sector masing-masing. 3) Kinerja termasuk dalam interval 25 - 75 % percentile dari seluruh kandidat hijau di sektor masing-masing	30 10 0
	b. Memperoleh penghargaan minimal dalam level nasional berkaitan dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati.	0-----3
	c. Program perlindungan keanekaragaman hayati berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat	0-----10

C. KRITERIA *COMMUNITY DEVELOPMENT*

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
1. Kebijakan <i>Community Development</i>	a. Terdapat kebijakan tertulis perusahaan mengenai CD	0-----2
2. Struktur dan Tanggung jawab	a. Memiliki unit yang menangani <i>Community Development</i> : 1) Manusia (personil memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan <i>Community Development</i>). 2) Memiliki struktur yang secara tertulis memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan <i>Community Development</i>	0-----2 0-----2

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	3) Ketersediaan dana untuk pelaksanaan <i>Community Development</i> selama minimal 3 tahun berturut-turut.	0-----2
3. Perencanaan	<p>a. Perusahaan dapat menunjukkan dokumen sosial mapping yang di dalamnya terdapat:</p> <p>1) Pemetaan jaringan social yang memberikan gambaran tentang garis-garis hubungan antar kelompok/individu</p> <p>2) Informasi mengenai siapa, kepentingannya, jaringannya dengan siapa, dan posisi sosial</p> <p>3) Analisis jaringan sosial dan derajat kepentingan masing-masing stakeholder (contoh: Kontraktor penyedia tenaga kerja, penyedia sarana, pemasok makan karyawan)</p> <p>4) Identifikasi masalah sosial</p> <p>5) Identifikasi potensi (modal sosial)</p> <p>6) Perumusan kebutuhan masyarakat yang akan ditangani dalam program <i>community development</i></p> <p>7) Identifikasi kelompok rentan</p> <p>b. Dokumen sosial mapping yang disampaikan merupakan update 3 tahun terakhir</p> <p>c. Perusahaan dapat menunjukkan dokumen rencana strategis pengembangan masyarakat yang didalamnya terdapat:</p> <p>1) Program bersifat jangka panjang dan dirinci dengan program tahunan</p> <p>2) Program menjawab kebutuhan kelompok rentan</p> <p>3) indicator untuk mengukur kinerja capaian program yang terukur</p> <p>4) proses perencanaan melibatkan anggota masyarakat</p>	<p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----5</p> <p>0-----2</p> <p>0-----4</p> <p>0-----4</p> <p>0-----4</p> <p>0-----4</p>
4. Evaluasi dan Pelaporan	a. Dapat menunjukkan dokumen pelaporan dan evaluasi pelaksanaan CD 3 tahun terakhir yang di dalamnya terdapat:	

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	1) Kesesuaian program dengan indikator kinerja capaian program yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis 2) Kesesuaian program dengan perencanaan 3) Kesesuaian implementasi program dengan waktu yang direncanakan 4) Kesesuaian program dengan anggaran yang direncanakan 5) System evaluasi yang dilakukan oleh manajemen dan diketahui oleh pimpinan perusahaan. 6) Bukti-bukti upaya perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi 7) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menyangkut program CD 8) Lahirnya institusi ekonomi lokal baru, keberlanjutan institusi, dan perkembangan institusi b. Mampu menunjukan bukti-bukti keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi c. Dapat menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki prosedur untuk menangani konflik dengan masyarakat. d. Dapat menunjukkan catatan kejadian keluhan masyarakat dan penanganannya selama dua tahun terakhir. e. Dapat menunjukkan bukti bahwa kejadian konflik dengan masyarakat selama dua tahun terakhir mengalami penurunan.	0-----1 0-----1 0-----1 0-----1 0-----1 0-----1 0-----1 0-----1 0-----1 0-----3 0-----3 0-----3 0-----3
5. Implementasi Program	a. Kesesuaian program dengan perencanaan 1) 75% program yang diimplementasikan sesuai dengan perencanaan 2) 100% program yang diimplementasikan sesuai dengan waktu yang direncanakan 3) 75% program yang diimplementasikan sesuai dengan	0-----3 0-----3

ASPEK PENILAIAN	KRITERIA	NILAI
	anggaran yang direncanakan	0-----3
	b. Memiliki publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang relevan tentang status dan kecenderungan <i>Community Development</i> yang dikelola minimal diterbitkan 1 tahun terakhir	0-----5
	c. Dapat menunjukkan bukti-bukti dana CD (> 1% dari laba bersih)	0-----5
	d. Adanya pengakuan (sertifikat) dari pemerintah dan pihak lain bahwa perusahaan telah berpartisipasi dalam pembangunan daerah dalam waktu 1 tahun terakhir minimal tingkat provinsi	0-----10

D. KRITERIA PENILAIAN *COMMUNITY DEVELOPMENT* EMAS

No	Kriteria Penilaian	Nilai
1	Pelaksanaan program CD direncanakan	
	a. Seluruh program gagal dilaksanakan, terdapat klaim dari pemangku dan penerima	0
	b. Sebagian besar program dilaksanakan, karena salah prosedur atau mekanisme umpan balik tertutup	5
	c. Seluruh program berhasil dilaksanakan, karena melampaui/mencapai seluruh indicator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam perencanaan	10
2	Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menyangkut program CD, >50% masyarakat yang menerima program menyatakan puas	10
3	Kohesi sosial masyarakat	
	a. Terdapat konflik dalam masyarakat yang terkait dengan perusahaan 1 tahun terakhir	-10
	b. Terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat selama 1 tahun terakhir (konflik yang tercatat aparat pemerintah)	-10
4	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan program (bukan penerima)	
	a. Proses implementasi melibatkan masyarakat	0---4
	b. Proses implementasi melibatkan lembaga swadaya masyarakat	0---4
	c. Proses implementasi melibatkan lembaga pemerintah daerah (kabupaten/kota)	0---2

5	Keberhasilan mendorong ke arah kemandirian		
	a. Berhasil memandirikan masyarakat, menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat.	5	
	b. >25% Penerima program/kelompok sasaran mampu memanfaatkan akses yang diberikan perusahaan	5	
	c. Kelompok sasaran mampu mengembangkan keterampilan kepada kelompok lain	5	
	d. Institusi ekonomi lokal baru karena program <i>community development</i> (salah satu terpenuhi) 1) Lahirnya institusi baru 2) Keberlanjutan institusi 3) Perkembangan Institusi	5	

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Inar Ichsana Ishak

Lampiran III
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 05 Tahun 2011
Tanggal : 11 Oktober 2011

MEKANISME PENILAIAN PROPER

A. TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan pelaksanaan pada dasarnya adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan PROPER selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup:

1. Penyusunan Kriteria

- a. Kriteria penilaian PROPER terdiri dari dua bagian yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*).
- b. Untuk penilaian ketaatan, aspek yang dinilai adalah ketaatan terhadap :
 - 1) persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya;
 - 2) pengendalian pencemaran air;
 - 3) pengendalian pencemaran udara;
 - 4) peraturan pengelolaan limbah B3; dan
 - 5) potensi kerusakan lahan.
- c. Kriteria penilaian ketaatan dilakukan pembaharuan setiap tahunnya dengan memasukkan peraturan-peraturan terbaru ke dalam kriteria.
- d. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) lebih bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktek-praktek pengelolaan lingkungan terbaik dan isu-isu lingkungan yang bersifat global.
- e. Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) terdiri dari :
 - 1) kriteria penilaian sistem manajemen lingkungan
 - 2) kriteria penilaian pemanfaatan sumber daya
 - 3) kriteria penilaian pemberdayaan masyarakat
- f. Penyusunan kriteria yang terkait dengan pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak antara lain pemerintah provinsi, kabupaten/kota, asosiasi industri, usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, LSM, perguruan tinggi, instansi terkait, dan Dewan Pertimbangan Proper.
- g. Menteri menetapkan Kriteria Penilaian Proper.
- h. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengusulkan kriteria penentuan proper yang spesifik untuk daerahnya masing-masing dengan ketentuan:

- 1) usulan kriteria didasarkan atas peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tidak boleh longgar daripada peraturan nasional; dan
 - 2) pencrapan kriteria tersebut harus mendapatkan persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup.
2. Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya
- a. Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya melalui Proper selanjutnya disebut sebagai Peserta Proper.
 - b. Kriteria Peserta Proper:
 - 1) termasuk kegiatan wajib amdal;
 - 2) produk yang dihasilkan untuk tujuan ekspor;
 - 3) terdaftar dalam pasar bursa;
 - 4) menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional. Usaha dan atau kegiatan yang memperoleh peliputan berita-berita di media massa skala regional maupun nasional merupakan peserta potensial Proper. Selain itu, perhatian dari pemangku kepentingan strategis seperti lembaga legislatif, lembaga swadaya masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan penting untuk penapisan peserta Proper;
 - 5) skala kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
 - 6) lokasi usaha dan/atau kegiatan berada di kawasan yang mempunyai risiko tinggi terhadap terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan masyarakat; dan
 - 7) mengajukan secara sukarela untuk menjadi Peserta PROPER.
 - c. Jumlah Peserta Proper ditetapkan dengan mengacu kepada:
 - 1) kriteria peserta proper;
 - 2) rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup atau rencana strategis pelaksanaan Proper;
 - 3) usulan dari unit-unit terkait yang didasarkan pada kepentingan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran;
 - 4) usulan dari pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - d. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengusulkan usaha dan/atau kegiatan dengan mengacu kepada Kriteria Peserta Proper.
 - e. Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan usulan Peserta Proper yang disampaikan oleh Pemerintah kabupaten/kota.
 - f. Sekretariat Proper mengkoordinasikan usulan Peserta Proper dari masing-masing unit Kementerian Lingkungan Hidup, usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta usulan dari industri secara sukarela.
 - g. Ketua tim teknis Proper menetapkan daftar peserta usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.
 - h. Pengawasan yang dilakukan oleh Proper adalah pengawasan yang bersifat wajib, sehingga usaha dan atau kegiatan yang telah ditetapkan sebagai peserta Proper tidak dapat menolak kecuali usaha dan atau kegiatan tersebut sudah atau sedang tidak

beroperasi atau sedang dalam proses penegakan hukum lingkungan.

- i. Pemberitahuan kepada Peserta Proper dilakukan dengan jalan mengundang perusahaan yang bersangkutan dalam kegiatan sosialisasi Proper sebelum pelaksanaan inspeksi atau pemberitahuan secara tertulis.
3. Dekonsentrasi PROPER
 - a. Dengan semakin bertambahnya target peserta Proper, maka Kementerian Lingkungan Hidup memberikan kewenangan pelaksanaan Proper kepada pemerintah provinsi yang ditunjuk.
 - b. Ketua tim teknis Proper menetapkan Pemerintah Provinsi yang ditunjuk dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya manusia dan kemudahan dalam kerjasama.
 - c. Susunan tim pelaksana Proper provinsi adalah :
 - 1) ketua tim pelaksana Proper;
 - 2) sekretariat tim pelaksana Proper;
 - 3) koordinator tim inspeksi;
 - 4) tim inspeksi lapangan.
 - d. Ketua tim teknis Proper menetapkan industri yang diserahkan pengawasannya kepada provinsi, tahapan dan jadwal pelaksanaan pengawasan dan penyusunan laporan serta mekanisme pengawasan dan pemeringkatan provinsi.
 4. Penguatan Kapasitas
 - a. Tim teknis melakukan penguatan kapasitas sumberdaya manusia baik kepada tim teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup maupun kepada Tim Pelaksana Proper provinsi dan kabupaten/kota. Peningkatan kapasitas dilakukan oleh tim teknis sendiri atau mengundang pakar dari luar yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan peningkatan kapasitas kepada tim pelaksana Proper provinsi.
 - c. Tim Pelaksana Proper provinsi melakukan peningkatan kapasitas kepada Tim Pelaksana Proper kabupaten/kota dengan menggunakan muatan materi dan narasumber yang ditetapkan oleh tim teknis Proper.
 - d. Sekretariat Proper mengkoordinasikan pelaksanaan penguatan kapasitas.
 5. Sosialisasi
 - a. Tim Teknis Proper melakukan sosialisasi kegiatan Proper kepada stakeholder terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Proper. Kegiatan sosialisasi Proper dilakukan melalui berbagai metode seperti pencetakan dan penyebaran *leaflet* dan *booklet*, seminar dan *workshop*, dan kegiatan dengan media massa.
 - b. Dalam rangka sosialisasi kriteria penilaian Proper, maka:

- 1) Tim teknis Proper melakukan sosialisasi kepada usaha dan atau kegiatan yang dinilai, asosiasi industri dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam skala nasional.
- 2) Tim pelaksana Proper provinsi melakukan sosialisasi kepada usaha dan atau kegiatan yang dinilai/industri di wilayahnya dengan narasumber dari Tim Teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup.

B. PENILAIAN PERINGKAT BIRU, MERAH DAN HITAM

1. Pengumpulan data
 - a. Dalam rangka penilaian peringkat biru, merah dan hitam terdapat dua jenis data yang menjadi acuan tim teknis dalam menentukan peringkat Proper, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dihasilkan oleh pihak selain tim teknis, dan data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh tim teknis dalam kegiatan inspeksi.
 - b. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh tim teknis berdasarkan pelaporan dan pemantauan berasal dari usaha dan atau kegiatan yang dinilai, pemerintah daerah, dan pihak ke-3 yang dapat dipertanggung jawabkan. Data sekunder tersebut dapat dikumpulkan oleh tim teknis dalam bentuk hard copy maupun soft copy.
 - c. Pengumpulan data sekunder dari kuesioner dilakukan oleh Tim teknis atau unit-unit teknis Kementerian Lingkungan Hidup dengan dikoordinasi oleh Sekretariat Proper.
 - d. Tim Pelaksana Proper provinsi dapat mengumpulkan data dengan kuisisioner dan melaporkan hasil kusioner kepada sekretariat Proper.
2. Pelaksanaan inspeksi
 - a. Inspeksi dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer dilakukan oleh tim inspeksi lapangan yang dengan ditetapkan oleh Ketua/wakil ketua tim teknis.
 - b. Ketua Tim Teknis dapat mendelegasikan penetapan dan penugasan Tim Pelaksana Proper provinsi kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi yang ditunjuk untuk melaksanakan Proper.
 - c. Pelaksanaan inspeksi yang dilakukan harus mengacu pada panduan inspeksi.
 - d. Susunan tim inspeksi adalah sebagai berikut:

OBJEK PENGAWASAN	SUSUNAN TIM
Industri yang diawasi KLH	Petugas PROPER KLH a. 1 orang pengawasan aspek air dan udara; b. 1 orang pengawasan aspek Pengelolaan limbah B3; c. 1 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup kabupaten/kota.

Industri yang di awasi oleh Provinsi	Petugas Proper Provisisi a. 1 orang pengawasan aspek air dan udara; b. 1 orang pengawasan aspek Pengelolaan limbah B3; c. 1 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
--------------------------------------	--

- e. Seluruh biaya pelaksanaan inspeksi ditanggung oleh biaya APBN Kementerian Lingkungan Hidup.
 - f. Pada akhir pengawasan harus disusun Berita Acara Pengawasan Proper, yang didalamnya paling tidak memuat informasi :
 - 1) informasi umum usaha dan atau kegiatan yang dinilai;
 - 2) kinerja pnaatan dalam pengendalian pencemaran air;
 - 3) kinerja pnaatan dalam pengendalian pencemaran udara;
 - 4) kinerja pnaatan pengelolaan limbah B3;
 - 5) pelaksanaan Amdal atau UKL/UPL;
 - 6) Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.
3. Penyusunan laporan inspeksi
- a. Penyusunan laporan inspeksi lapangan dilakukan oleh tim inspeksi atau pejabat pengawas Lingkungan Hidup setelah melaksanakan kunjungan lapangan. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap pnaatan kinerja usaha dan atau kegiatan yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan.
 - b. Laporan inspeksi berupa memo yang berisi ringkasan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada atasan masing-masing dengan dilampiri oleh:
 - 1) berita acara pengawasan proper;
 - 2) foto-foto hasil pengawasan lapangan;
 - 3) data swapantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai;
 - 4) data hasil pengambilan sampel oleh KLH;
 - 5) hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah b3
 - 6) hasil pengisian daftas isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan.
 - c. Laporan inspeksi disampaikan kepada masing-masing Asisten Deputi atau Kepala Instansi Pengelolaan Lingkungan provinsi dan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Sekretariat Proper.
4. Penyusunan Rapot Sementara
- a. Petugas Proper menyusun rapot sementara berdasarkan Berita Acara Pengawasan Proper, foto-foto hasil pengawasan lapangan, data swa pantau yang dilaporkan usaha dan atau kegiatan yang dinilai, Data hasil pengambilan sampel oleh KLH, hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3, hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan dan

progress perbaikan yang telah dilakukan usaha dan atau kegiatan yang dinilai.

- b. Rapot sementara adalah penilaian sementara kinerja pengelolaan lingkungan aspek Amdul/UKL-UPL, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kriteria penilaian Proper yang telah ditetapkan.
 - c. Format rapot sementara mengacu kepada format yang ditetapkan oleh tim teknis dan kinerja pengendalian pencemaran air, udara dan limbah B3 dihitung dengan menggunakan *spreadsheet* analisa kinerja yang telah ditetapkan.
 - d. Unit teknis (Asisten Deputi yang menangani masing-masing sektor) melakukan *peer review* dalam penyusunan rapot sementara untuk memastikan kesesuaian Rapot Sementara dengan kriteria penilaian Proper, validitas data dan menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper.
 - e. Unit Teknis kemudian menyusun status penataan/peringkat awal usaha dan atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapot sementara.
 - f. Unit Teknis selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penataan / peringkat awal usaha dan atau kegiatan yang dinilai kepada ketua tim teknis melalui Sekretariat Proper. Setelah melakukan konsultasi dengan ketua tim teknis, sekretariat Proper menentukan jadwal untuk review peringkat awal.
 - g. Tim Pelaksana Proper Provinsi melakukan *peer review* dalam penyusunan rapot sementara.
 - h. Tim Teknis Proper Kementerian Lingkungan Hidup melakukan supervisi kepada Tim Pelaksana Proper Provinsi untuk memastikan kesesuaian Rapot Sementara dengan kriteria penilaian Proper, validitas data dan menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper serta kesesuaian dengan jadwal pelaksanaan Proper yang telah ditetapkan.
 - i. Tim Pelaksana Proper Provinsi menyusun status penataan/peringkat awal usaha dan atau kegiatan yang dinilai, yang merupakan hasil rekapitulasi dari rapot sementara.
 - j. Ketua Tim Pelaksana Proper Provinsi selanjutnya melaporkan secara tertulis hasil status penataan usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan peringkat awal usaha dan atau kegiatan yang dinilai kepada Ketua Tim Teknis melalui Sekretariat Proper.
 - k. Sekretariat Proper mengkoordinasikan kegiatan supervisi.
5. *Review* peringkat tahap I
- a. *Review* peringkat tahap I dilakukan oleh tim teknis terhadap usulan peringkat awal yang disampaikan oleh tim inspeksi masing-masing usaha dan atau kegiatan yang dinilai.
 - 1) tim inspeksi mempresentasikan hasil kinerja penataan masing-masing usaha dan atau kegiatan yang dinilai kepada tim teknis Proper.
 - 2) Tim Teknis Proper yang melakukan supervisi terhadap Tim Pelaksana Proper Provinsi mempresentasikan hasil kinerja

- penaatan masing-masing usaha dan atau kegiatan yang dinilai kepada tim teknis Proper.
- b. Tim Teknis Proper memberikan klarifikasi dan tanggapan atas usulan peringkat yang disampaikan oleh tim inspeksi dan Tim Teknis Proper yang melakukan supervisi terhadap Tim Pelaksana Proper Provinsi.
 - c. Tim Teknis Proper dapat meminta klarifikasi dan tanggapan usulan status penataan / peringkat awal Proper dari Tim Pelaksana Proper Provinsi.
 - d. Tim Teknis Proper dapat menugaskan Tim Inspeksi untuk melakukan inspeksi lapangan ulang jika terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk menjaga validitas data dan kredibilitas Proper.
 - e. Tim Teknis Proper memutuskan status penataan/peringkat Proper sementara.
 - f. Setiap anggota tim yang terlibat dalam penetapan peringkat awal wajib menjaga kerahasiaan peringkat sementara.
 - g. Hasil review peringkat tahap I ini selanjutnya disampaikan oleh ketua tim teknis kepada Dewan Pertimbangan Proper.
6. Penentuan peringkat sementara
- a. Berdasarkan hasil review peringkat sementara, Dewan Pertimbangan menentukan status penataan / peringkat sementara Proper.
 - b. Dewan Pertimbangan Proper dapat menugaskan Tim Teknis untuk melakukan inspeksi lapangan ulang jika terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk menjaga validitas data dan kredibilitas Proper.
 - c. Tim Teknis menindaklanjuti Keputusan Dewan Pertimbangan Proper dengan melakukan:
 - 1) penetapan penetapan peringkat sementara;
 - 2) penyusunan raport masing-masing usaha dan/atau kegiatan yang dinilai; dan
 - 3) penyampaian hasil peringkat kepada masing-masing usaha dan atau kegiatan yang dinilai, tembusan kepada Pusat Pengelolaan Ekoregion, Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
7. Pemberitahuan hasil peringkat sementara
- a. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke usaha dan atau kegiatan yang dinilai dilakukan agar usaha dan atau kegiatan yang dinilai mengetahui tingkat kinerja Proper sebelum diumumkan kepada masyarakat. Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat Ketua tim teknis tentang penetapan peringkat sementara untuk masing-masing usaha dan atau kegiatan yang dinilai Proper.
 - b. Informasi yang harus dicantumkan di dalam surat penetapan peringkat sementara ini, antara lain: peringkat kinerja sementara dan raport kinerja usaha dan atau kegiatan yang dinilai.

- c. Tim Teknis Proper dan Tim Pelaksana Proper provinsi bertanggung jawab untuk menyampaikan peringkat kinerja sementara dan rapot kinerja sementara kepada usaha dan atau kegiatan yang dinilai.
 - d. Tim teknis Proper dan Tim Pelaksana Proper Provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan Peringkat Kinerja Sementara dan Rapot Kinerja Sementara dapat diterima oleh usaha dan atau kegiatan yang dinilai.
8. Sanggahan /Klarifikasi
- a. Untuk menciptakan keadilan dalam pelaksanaan Proper, usaha dan atau kegiatan yang dinilai diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara.
 - b. Tim Teknis Proper menyelenggarakan Sanggahan/Klarifikasi untuk usaha dan atau kegiatan yang pengawasannya menjadi tugas Kementerian Lingkungan Hidup.
 - c. Tim Pelaksana Proper Provinsi menyelenggarakan Sanggahan/Klarifikasi untuk usaha dan atau kegiatan yang pengawasannya menjadi tugas Provinsi.
 - d. Tim Teknis Proper melakukan Supervisi terhadap Sanggahan/Klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Proper Provinsi.
 - e. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar sendiri ataupun melalui fax dan pos. Batas waktu sanggahan ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis Proper atau Ketua Tim Pelaksana Proper Provinsi. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu tersebut, maka dianggap menerima hasil Peringkat Kinerja Sementara dan Rapot Kinerja Sementara.
 - f. Tim Teknis Proper dan Tim Pelaksana Proper Provinsi sesuai dengan sanggahan tertulis yang disampaikan ke usaha dan atau kegiatan yang dinilai akan melakukan proses klarifikasi dengan pihak usaha dan atau kegiatan yang dinilai.
 - g. Tim Teknis Proper dan Tim Pelaksana Proper Provinsi menuangkan hasil klarifikasi dari sanggahan tersebut ke dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh pihak usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan unit teknis terkait.
 - h. Tim Teknis Proper menyelenggarakan Sanggahan/Klarifikasi Banding bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak menerima hasil sanggahan/klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Proper Provinsi.
 - i. Perwakilan Usaha dan atau Kegiatan wajib menulis secara jelas akan melakukan Sanggahan/Klarifikasi Banding di dalam berita acara sanggahan yang ditandatangani dengan Tim Pelaksana Proper Provinsi. Jika tidak tercantum dalam berita acara, maka perusahaan dianggap menerima hasil sanggahan dan klarifikasi di tingkat Provinsi dan proses sanggahan/klarifikasi banding tidak dapat dilanjutkan.

- j. Tim Teknis Proper menuangkan hasil sanggahan/klarifikasi banding tersebut ke dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pihak usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan unit teknis terkait.
 - k. Tim Teknis akan melaporkan hasil klarifikasi sanggahan kepada Dewan Pertimbangan Proper.
9. *Review* hasil sanggahan oleh Dewan Proper
- a. Berdasarkan hasil verifikasi sanggahan yang dilakukan oleh tim teknis bersama dengan tim inspeksi lapangan, Dewan pertimbangan akan melakukan *review* terhadap verifikasi hasil sanggahan usaha dan atau kegiatan yang dinilai. *Review* dari Dewan Pertimbangan ini akan menentukan apakah sanggahan tersebut dapat diterima atau perlu diverifikasi ulang.
 - b. Dalam melakukan *review* hasil terhadap sanggahan usaha dan atau kegiatan yang dinilai, Dewan Pertimbangan dapat melakukan verifikasi langsung kepada usaha dan atau kegiatan yang dinilai atau melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan. Verifikasi ini diperlukan untuk menjamin bahwa informasi yang disampaikan oleh usaha dan atau kegiatan yang dinilai tersebut dapat dipertimbangan.
 - c. Ketua Tim Teknis menetapkan daftar peringkat sementara Proper dan daftar kandidat Hijau dan Emas Proper dari hasil *review* Dewan Pertimbangan Proper.
10. *Review* peringkat tahap II
- a. *Review* peringkat Tahap II adalah tindak lanjut dari kegiatan pembahasan/evaluasi peringkat kinerja usaha dan atau kegiatan oleh pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan hasil penilaian yang lebih *comprehensive* dari berbagai sudut pandang dan keahlian.
 - b. *Review* peringkat tahap II dipimpin oleh ketua tim teknis dan atau wakil ketua tim teknis. Dalam tahap ini dapat dilakukan verifikasi ulang apabila diperlukan.
 - c. Bahan bahasan penentuan peringkat tahap II disusun oleh Sekretariat Proper dan unit teknis terkait berdasarkan penentuan peringkat tahap I.
 - d. *Review* Tahap II (Eselon I) dapat meminta verifikasi lapangan apabila masih diperlukan kelengkapan data (Usulan peringkat masih diragukan).
11. Konsultasi Publik
- a. Dewan Pertimbangan Proper dapat meminta Tim Teknis Proper menyelenggarakan konsultasi kepada pemangku-pemangku kepentingan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Instansi Teknis Sektoral, Asosiasi Industri dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu untuk menampung masukan berkaitan dengan pemeringkatan Proper.

- b. Ketua Tim Teknis Proper melakukan tindak lanjut dari hasil konsultasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Proper.

C. MEKANISME PENILAIAN HIJAU DAN EMAS

1. Penetapan Kandidat Hijau Dan Emas
 - a. Tim teknis mengusulkan kandidat hijau dan emas berdasarkan hasil pemeringkatan sementara kepada Dewan Pertimbangan Proper.
 - b. Dewan Pertimbangan Proper membahas dan memberikan masukan atas Usulan Ketua Tim Teknis Proper.
 - c. Ketua Tim teknis akan menetapkan kandidat hijau dan emas dengan memperhatikan masukan dari Dewan Pertimbangan Proper.
 - d. Kandidat hijau dan emas ditentukan berdasarkan hasil penilaian tingkat ketaatan usaha dan atau kegiatan yang dinilai dengan ketentuan, tingkat ketaatan terhadap:
 - 1) Persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya adalah 100%;
 - 2) Pengendalian pencemaran air adalah 100%;
 - 3) Pengendalian pencemaran udara adalah 100%;
 - 4) Peraturan pengelolaan limbah B3 adalah 100%;
 - 5) Potensi kerusakan lahan dengan kategori Biru;
 - 6) Kondisi *house keeping* di lokasi usaha dan/atau kegiatan, unit pengendalian pencemaran air, unit pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 bersih;
 - 7) Kemudahan dalam akses data pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3; dan
 - 8) Pada saat verifikasi lapangan tidak ada temuan yang bersifat major yang dituangkan dalam berita acara verifikasi lapangan.
2. Penetapan Tim Penilai Hijau dan Emas
 - a. Ketua Tim Teknis Proper menugaskan Tim Penilai Hijau dan Emas dari unit terkait di Kementerian Lingkungan Hidup dan dapat dibantu oleh tenaga ahli apabila diperlukan untuk melakukan penilaian.
 - b. Tim Penilai Hijau dan Emas berkewajiban sebagai berikut :
 - 1) Menilai setiap usaha dan atau kegiatan yang dinilai kandidat dengan jujur, cermat, teliti, adil dan independen.
 - 2) Menuangkan setiap angka penilaian per item ke dalam lembar penilaian yang telah disediakan.
 - c. Ketua Tim Teknis Proper menetapkan pembagian sektor penilaian dengan menggolongkan usaha dan atau kegiatan berdasarkan persamaan karakteristik dampak dan jenis usahanya.
 - d. Sekretariat Proper bertugas untuk memfasilitasi seluruh proses penilaian dalam mengkoordinasikan hasil penilaian

3. Pengiriman Isian Penilaian Hijau dan Emas
 - a. Unit Teknis dibantu oleh Sekretariat Proper mengirimkan Isian Penilaian Hijau dan Emas kepada kandidat dan memastikan setiap kandidat menerima formulir Isian tersebut.
 - b. Usaha dan atau kegiatan yang dinilai mengisi Isian tersebut dan melampirkan bukti-bukti yang relevan dalam bentuk satu dokumen hardcopy dan satu cakram softcopy pada batas waktu yang ditetapkan dalam surat pengantar. Batas waktu yang ditetapkan dalam surat pengantar adalah batas waktu diterimanya dokumen oleh Sekretariat Proper.
 - c. Isian Penilaian Hijau dan Emas terdiri dari:
 - 1) Surat pernyataan dari pimpinan usaha dan atau kegiatan yang dinilai yang menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar dan pimpinan bertanggungjawab secara etika dan hukum terhadap kebenaran data yang disampaikan.
 - 2) Formulir isian penilaian hijau dan emas
 - a) formulir isian ini terdiri dari formulir isian untuk penilai sistim manajemen lingkungan, penilai pemanfaatan sumber daya, penilai program pemberdayaan masyarakat.
 - b) bukti-bukti yang relevan dapat berupa salinan sertifikat, penghargaan, referensi yang mendukung data-data yang digunakan dalam formulir isian, foto, hasil kajian, perhitungan-perhitungan yang mendukung angka ataupun grafik yang digunakan formulir isian.
 - 3) Dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan usaha dan atau kegiatan yang dinilai yang berupa makalah yang paling banyak 20 lembar yang berisi deskripsi secara ringkas dan jelas tentang keunggulan-keunggulan lingkungan yang ingin ditonjolkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dinilai berdasarkan formulir isian dan bukti-bukti relevan tentang Sistim Manajemen Lingkungan, Pemanfaatan Sumber Daya, Program Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Format dokumen ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan atau kegiatan yang dinilai menggunakan kertas ukuran A4, font Times New Roman, size 12 pt, spasi tunggal.
 - d. Jika tidak dilengkapi dengan surat pernyataan maka tidak akan dilakukan penilaian terhadap data-data yang disampaikan.
 - e. Jika tidak dilengkapi dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan akan dilakukan pengurangan sebanyak 150 poin dari total nilai.
 - f. Jika dokumen ringkasan kinerja pengelolaan usaha dan atau kegiatan yang dinilai lebih dari 20 halaman, maka dikurangi sebanyak 50 poin dari total nilai.
4. Evaluasi Dokumen
 - a. Kandidat Hijau dan Emas menyampaikan Isian Penilaian Hijau dan Emas kepada Sekretariat Proper sebelum batas waktu yang ditetapkan.

- b. Sekretariat Proper akan memberikan tanda terima. Jika tanggal tanda terima melebihi tanggal yang ditetapkan maka data yang disampaikan tidak terima dan tidak digunakan sebagai bahan penilaian selanjutnya, kecuali ada penetapan khusus dari Ketua Tim Teknis Proper.
- c. Sekretariat Proper memfasilitasi proses evaluasi dokumen dalam rangka penilaian peringkat hijau dan emas.
- d. Tim Penilai Hijau dan Emas melakukan penilaian peringkat hijau dan emas dengan menggunakan formulir penilaian.
- e. Penilaian Hijau dan Emas didasarkan atas penilaian terhadap 3 komponen utama yaitu:

No	Komponen Penilaian	Nilai
1	Sistem Manajeme Lingkungan	100
2	Pemanfatan Sumber Daya	
	a. Efisiensi energy.	100
	b. Penurunan emisi dan GRK, pemantauan emisi kendaraan bermotor	150
	c. Konservasi air	100
	d. Penurunan dan Pemanfaatan Limbah B3	100
	e. 3R sampah	100
	f. Keanekaragaman Hayati	
3	Pengembangan Masyarakat	
	a. Tingkat Penilaian Hijau	100
	b. Tingkat Penilaian Emas	50

- f. Tim Penilai Hijau dan Emas yang jumlahnya lebih dari satu orang masing-masing melakukan penilaian. Hasil penilaian dari masing-masing anggota tim dirata-ratakan.
- g. Jika terjadi perbedaan nilai antara yang ekstrim (terendah atau tertinggi) dengan nilai rata-rata lebih dari 30% maka akan dilakukan koreksi dengan metode sabagai berikut:
 - 1) dilakukan diskusi internal tim penilai sehingga dicapai suatu koreksi dari nilai-nilai ekstrem; atau
 - 2) dilakukan penghapusan hasil akhir bagi tim penilai yang mempunyai nilai ekstrim (tertinggi atau terendah). jika ekstrim tinggi yang ada maka data tersebut praktis dihilangkan, begitu juga jika terjadi ekstrim rendah.
 - 3) setelah diketahui nilai ekstrim dan telah dilakukan eliminasi nilai tersebut maka dihitung nilai rata rata baru tanpa nilai ekstrem.
 - 4) jika tidak ada nilai ekstrim maka nilai rata-rata lama masih berlaku.
- h. Masing-masing Ketua Tim Penilai melakukan rekapitulasi hasil penilaian dari kelompoknya dan mengumpulkan formulir penilaian lengkap dengan data-data yang digunakan untuk

penilaian. Rekapitulasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian.

- i. Sekretariat Proper melakukan rekapitulasi hasil penilaian dari Tim-Tim Penilai dan melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Teknis Proper.

5. Penentuan Peringkat

- a. Tim Teknis melakukan review hasil kerja Tim Penilai Peringkat Hijau dan Emas. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian Proper yang valid dan kredible maka Ketua Tim Teknis dapat memerintahkan untuk dilakukan penilaian ulang.
- b. Tim Teknis melakukan pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian yang direkap terakhir oleh Sekretariat Proper.
- c. Pemeringkatan dilakukan dengan Kriteria :
 - 1) Jika nilai total suatu usaha dan atau kegiatan berada sama atau di bawah 25% percentile dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan atau kegiatan tersebut kembali kepada peringkat BIRU.
 - 2) Jika nilai total suatu usaha dan atau kegiatan berada dalam interval di atas (> 25%) percentile sampai dengan (\leq 75 %) dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan atau kegiatan tersebut memperoleh peringkat HIJAU.
 - 3) Jika nilai total suatu usaha dan atau kegiatan lebih besar (> 75%) percentile dari distribusi nilai total per sektor, maka peringkat usaha dan atau kegiatan tersebut memperoleh menjadi kandidat emas.
- d. Ketua Tim Teknis mengusulkan Kandidat Hijau dan Emas untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan PROPER.

6. Kunjungan Lapangan

- a. Ketua Tim Teknis dapat menugaskan Tim Penilai Hijau dan Emas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap usaha dan atau kegiatan Kandidat Hijau dan Emas.
- b. Tim Penilai melakukan verifikasi terhadap kebenaran data-data yang disampaikan oleh usaha dan atau kegiatan yang dinilai dan informasi-informasi lain yang relevan.
- c. Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen dengan kenyataan di lapangan, maka dilakukan pengurangan nilai terhadap aspek-aspek penilaian yang relevan atau di lakukan pembatalan proses penilaian jika ditemukan unsur-unsur penipuan data.
- d. Tim Penilaian melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Ketua Tim Teknis dengan tembusan kepada Sekretariat Proper.
- e. Tim Teknis Proper membahas hasil kunjungan lapangan dengan Dewan Pertimbangan Proper.
- f. Ketua Tim Teknis menetapkan Peringkat Sementara berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Pertimbangan Proper.

7. Penentuan Peringkat Emas
 - a. Tim Teknis Proper dan Dewan Pertimbangan Proper melakukan penilaian kandidat emas dengan menggunakan kriteria Penilaian Program Pengembangan Masyarakat Emas.
 - b. Kriteria Kandidat Emas adalah usaha dan atau kegiatan yang selama 2 tahun berturut-turut memperoleh peringkat Hijau dan pada tahun ketiga telah melewati proses penilaian hijau dan Emas, serta ditetapkan sebagai kandidat Emas.
 - c. Tim Teknis Proper melakukan rekapitulasi hasil penilaian dan mengusulkan kandidat peringkat Emas kepada Dewan Pertimbangan Proper.
 - d. Dewan Pertimbangan Proper dapat menggunakan informasi lain yang berasal dari konsultasi publik atau sumber-sumber yang dapat dipercaya untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan Tim Teknis Proper.
 - e. Dewan Pertimbangan Proper memutuskan kandidat Emas dan Ketua Tim Teknis menetapkan Kandidat Emas untuk diusulkan kepada Menteri.

8. Penentuan Peringkat Hijau dan Emas Proper
 - a. Berdasarkan hasil proses penilaian biru, merah dan hitam dan proses penilaian hijau dan emas Dewan pertimbangan melakukan rapat teknis lengkap untuk usulan penentuan hasil peringkat akhir Proper. Penentuan hasil usulan peringkat akhir Proper dilakukan melalui keputusan musyawarah anggota Dewan Pertimbangan Proper.
 - b. Setelah ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan, usulan peringkat akhir Proper disampaikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.
 - c. Menteri Lingkungan Hidup memiliki hak untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas usulan peringkat akhir yang disampaikan Dewan Pertimbangan Proper.
 - d. Menteri Negara Lingkungan Hidup menetapkan Peringkat Proper.

D. PENGUMUMAN

1. Pembuatan laporan Menteri kepada Presiden
Berdasarkan usulan peringkat akhir yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Proper kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, sekretariat Proper membuat laporan Menteri kepada Presiden tentang Hasil Penilaian Proper dan rencana pengumuman hasil Proper kepada masyarakat.

2. Penyusunan Surat Keputusan Menteri
Setelah mendapatkan persetujuan Presiden RI terhadap hasil peringkat dan pengumuman Proper, sekretariat Proper menyusun rancangan Keputusan Menteri tentang Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). Rancangan tersebut diajukan oleh Ketua/wakil ketua tim teknis kepada Menteri untuk ditetapkan.

3. Penyampaian Surat Keputusan MENLH kepada Perusahaan Hasil peringkat masing-masing perusahaan setelah ditanda-tangani oleh MENLH dalam bentuk Keputusan Menteri disampaikan kepada masing-masing perusahaan dengan tembusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Penyusunan bahan pengumuman Proper
 - a. Untuk memudahkan masyarakat mengetahui peringkat kinerja dan hasil pelaksanaan Proper secara keseluruhan, tim teknis melalui sekretariat menyusun bahan publikasi. Bentuk dan jenis bahan publikasi disusun berdasarkan target.
 - b. Bahan publikasi ini akan dikomunikasikan kepada publik misalnya media massa, website www.menlh.go.id, sektor pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah, perbankan, lembaga terkait di tingkat nasional dan internasional.
5. Pengumuman Proper
 - a. Pengumuman Proper kepada publik dilakukan oleh MENLH dan Dewan Pertimbangan Proper melalui Konferensi Pers dengan mengundang media massa cetak, dan elektronik skala nasional dan internasional.
 - b. Tim Teknis Proper dibantu oleh Sekretariat Proper berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk menyelenggarakan pengumuman Proper.

E. TAHAP TINDAK LANJUT

1. Tindak lanjut terhadap industri berperingkat merah adalah memberikan sanksi administrasi kepada perusahaan merah untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan.
2. Usaha dan atau kegiatan yang memperoleh peringkat Proper hitam diserahkan kepada proses penegakan hukum lingkungan.

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas


Inar Ichsana Ishak

RIWAYAT HIDUP



FEBRIANI TRIASTUTI

Lahir di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1990. Peneliti tengah merampungkan studi di Universitas Negeri Jakarta Jurusan Akuntansi. Peneliti telah membuat dan mengajukan penelitian ini sebagai skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Peneliti telah menempuh pendidikan di SMA Negeri 13 Jakarta (2004-2007), SMP Negeri 30 Jakarta (2001-2004), dan SDN Rawa Badak Selatan 01 (1995-2001).

Peneliti dapat dihubungi di nomor ponsel 085695474037 atau melalui email di FT2S4_ThirteenHS@yahoo.com.